

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI KELURAHAN TORO KECAMATAN TANETE  
RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE**

**TESIS**

**SYAMSUL BAHRI**

**MPW4514013**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Magister**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone
2. Nama Mahasiswa : Syamsul Bahri
3. NIM : MPW 4514013
4. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.

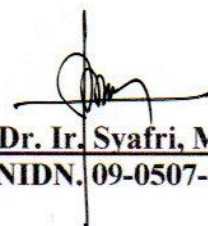
  
Dr. Ir. Svafri, M.Si.

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi PWK

  
Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.  
NIDN. 09-1301-7402

  
Dr. Ir. Svafri, M.Si.  
NIDN. 09-0507-6804

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019

Tesis Atas Nama : Syamsul Bahri

NIM : MPW4514013

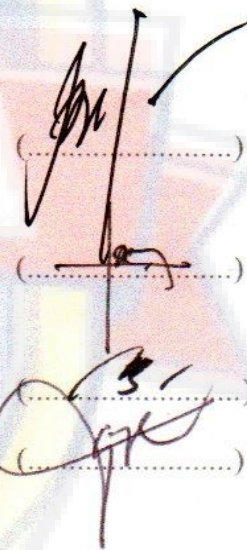
Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.  
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Ir. Syafri, M.Si.  
(Pembimbing II)

Anggota : 1. Dr. Ir. Murshal Manaf, MT.  
2. Dr. Ir. Syahriar Tato, SH., MH., MM., MS.



Makassar, 24 April 2019

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Bosowa

  
Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.

NIDN. 09-1301-7402

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **SYAMSUL BAHRI**

NIM : MPW / 4514013

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas : Bosowa Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tante Riattang Timur Kabupaten Bone” ini benar-benar merupakan karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau secara keseluruhan tesis ini adalah merupakan duplikat, tiruan, atau hasil karya orang lain, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum dan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

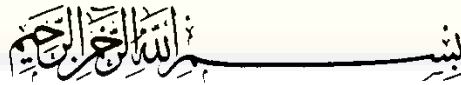
Makassar, April 2019

Yang Menyatakan,



**SYAMSUL BAHRI**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Karunia dan Rahmat yang diberikan kepada penulis, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan Kuasa Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Tesis) ini tepat pada waktunya meskipun dengan segala kendala yang ada. Tugas Akhir (Tesis) ini adalah salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa Makassar.

Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah ***“Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”***. Penelitian ini merupakan kajian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

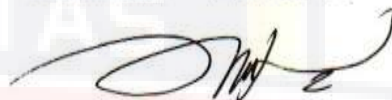
Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ir. Syafri, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Dr. Ir. Syafri, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar;

4. Teman-teman penulis yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun tenaganyasehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenaan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dalam studi selanjutnya, terutama dalam bidang penganganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

Makassar, April 2019



**SYAMSUL BAHRI**



**UNIVERSITAS  
BOSOWA**

## ABSTRAK

**Syamsul Bahri**, 2019. Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Toro Kecamatan Tante Riattang Timur Kabupaten Bone .” Dibimbing oleh : **Batara Surya dan Syafri**.

Kelurahan Toro merupakan salah satu Kelurahan di Kota Watampone Kabupaten Bone yang memiliki kawasan permukiman kumuh terluas di Kabupaten Bone. Program bantuan dari pemerintah pusat telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan prasarana lingkungan permukiman, dengan melibatkan organisasi masyarakat setempat di kawasan kumuh Kelurahan Toro.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Dianalisis menggunakan metode tabulasi silang (*cross-tab*) yang dibantu dengan uji chi-kuadrat (*chi-square*) untuk mengetahui tingkat efektivitas penanganan kumuh terhadap pengawasan ( $X_1$ ), Pengendalian, ( $X_2$ ), Pemberdayaan masyarakat ( $X_3$ ) dan Revitalisasi ( $X_4$ ).

Hasil analisis disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur. Sementara pengawasan, pengendalian, dan revitalisasi memiliki tingkat efektivitas sedang dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

**Kata Kunci** : Efektivitas Penanganan, Permukiman Kumuh, Kabupaten Bone

## **ABSTRACT**

*Syamsul Bahri, 2019. Effectiveness of Handling Slum Settlement Areas in Toro Village, East Tante Riattang District, Bone Regency.” Supervised by : Batara Surya and Syafri.*

*Toro Village is one of the villages in Watampone City, Bone Regency, which has the largest slum area in Bone Regency. The assistance program from the central government has made efforts to improve and improve the quality of the slum environment through rejuvenating the infrastructure of the residential environment, by involving local community organizations in the slum area of Toro Village.*

*The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of handling slum areas in Toro Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. Analyzed using cross tabulation method (cross-tab) assisted by chi-square test (chi-square) to determine the level of effectiveness of slum management for supervision (X1), Control, (X2), Community Empowerment (X3) and Revitalization (X4) .*

*The results of the analysis concluded that community empowerment has the highest level of effectiveness in efforts to handle slum settlements in Toro Village, Tanete Riattang Timur District. Meanwhile, supervision, control, and revitalization have a moderate level of effectiveness in efforts to handle slum settlements in Toro Village, Tanete Riattang Timur District.*

**Keywords: Effectiveness of Handling, Slum Settlement, Bone Regency**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Lingkup Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Konsep Efektivitas</b> .....	<b>10</b>
1. Pengertian Efektivitas.....	10

2. Ukuran Efektivitas.....	13
3. Indikator Efektivitas .....	15
<b>B. Pengertian Permukiman, Kumuh, dan Permukiman Kumuh .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Permukiman .....	19
2. Pengertian Kumuh.....	20
3. Permukiman Kumuh .....	21
<b>C. Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh .....</b>	<b>24</b>
1. Program Pengadaan Perumahan Baru .....	24
2. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.....	25
3. Program Peremajaan Kota .....	28
<b>D. Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh.....</b>	<b>31</b>
1. Pencegahan .....	31
2. Peningkatan Kualitas .....	33
<b>E. Pengertian Pengawasan.....</b>	<b>34</b>
<b>F. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota ....</b>	<b>37</b>
1. Peraturan Zonasi Kota .....	37
2. Peizinan .....	38
3. Pemberian Insentif .....	38
4. Pemberian Disinsentif .....	40
5. Sanksi.....	41
<b>G. Pemberdayaan Masyarakat.....</b>	<b>41</b>
<b>H. Teori Revitalisasi .....</b>	<b>43</b>

I. Penelitian yang Relevan.....	45
J. Perumusan Variabel dan Indikator.....	47
K. Kerangka Pikir.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Metode Observasi .....	54
2. Metode Wawancara.....	55
3. Metode Pertanyaan ( <i>Questioner</i> ) .....	55
4. Pendataan Instansional .....	55
5. Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ).....	55
E. Populasi dan Sampel.....	56
F. Teknik Analisa Data.....	57
G. Variabel Penelitian.....	61
H. Defenisi Operasional Penelitian.....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone.....	64
1. Aspek Fisik Wilayah.....	64
2. Aspek Kependudukan/Demografi .....	67
3. Aspek Ekonomi .....	69

4. Aspek Sosial/Kebudayaan .....	70
B. Gambaran Umum Wilayah (Kecamatan Tanete Riattang Timur) .....	71
1. Aspek Fisik Dasar .....	71
2. Pertumbuhan Penduduk .....	73
C. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Kelurahan Toro .....	74
1. Wilayah Administrasi Kelurahan .....	75
2. Kondisi Prasarana-Sarana Dasar Lingkungan .....	79
D. Data Umum Permukiman Kumuh .....	87
E. Kondisi Bangunan Rumah Tinggal.....	88
F. Analisis Efektivitas Penanganan Kumuh.....	89
1. Efektivitas (Y) terhadap Pengawasan (X1) .....	91
2. Efektivitas (Y) terhadap Pengendalian (X2).....	95
3. Efektivitas (Y) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (X3) .....	101
4. Efektivitas (Y) terhadap Revitalisasi (X4).....	105
G. Pembahasan Hasil Analisis Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.....	109
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran dan Rekomendasi.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rumusan Variabel dan Indikator.....	48
Tabel 3.1 Data yang dibutuhkan dalam penelitian .....	53
Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Penelitian.....	65
Tabel4.1. Luas Wilayah MenurutKecamatan Di Kabupaten Bone, Tahun 2014 .....	65
Tabel4.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone,Tahun 2014 .....	68
Tabel4.3. Perkembangan PDRB di Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Berlaku (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2012 – 2013...	70
Tabel: 4.4. Perkembangan Penduduk (Kec. Tanete Riattang Timur) Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir (Tahun 2009-2013).....	74
Tabel 4.5. Data Sebaran Jumlah Penduduk Kelurahan.....	77
Tabel 4.6. Penggunaan Lahan.....	78
Tabel 4.7. Kondisi Jalan.....	80
Tabel 4.8 Pelayanan Air Minum.....	82
Tabel 4.9 Potensi sumber Air Bersih.....	83
Tabel 4.10 Sarana Sanitasi Lingkungan .....	84
Tabel 4.11. Sarana Persampahan .....	86
Tabel 4.12 Sebaran Lokasi Kumuh.....	87
Tabel 4.13 Kondisi Bangunan Rumah Tinggal.....	88

Tabel 4.14 Case Processing Summary .....	90
Tabel 4.15 Crosstab Efektivitas terhadap Pengawasan .....	91
Tabel 4.16 Crosstab Efektivitas terhadap Monitoring .....	92
Tabel 4.17. Crosstab Efektivitas terhadap Evaluasi .....	93
Tabel 4.18 Crosstab Efektivitas terhadap Pelaporan .....	94
Tabel 4.19. Crosstab Efektivitas terhadap Pengendalian .....	95
Tabel 4.20. Crosstab Efektivitas terhadap Peraturan Zonasi .....	96
Tabel 4.21. Crosstab Efektivitas terhadap Perizinan.....	97
Tabel 4.22. Crosstab Efektivitas terhadap Insentif.....	98
Tabel 4.23 Crosstab Efektivitas terhadap Disinsentif .....	99
Tabel 4.24. . Crosstab Efektivitas terhadap Sanksi.....	100
Tabel 4.25 Crosstab Efektivitas terhadap Pemberdayaan Masyarakat .....	101
Tabel 4.26 Crosstab Efektivitas terhadap Perencanaan.....	102
Tabel 4.27. Crosstab Efektivitas terhadap Pelaksanaan .....	103
Tabel 4.28. Crosstab Efektivitas terhadap Pemeliharaan .....	104
Tabel 4. 29. Crosstab Efektivitas terhadap Revitalisasi .....	105
Tabel 4.30. Crosstab Efektivitas terhadap Pemugaran .....	106
Tabel 4.31 Crosstab Efektivitas terhadap Peremajaan.....	107
Tabel 4.32. Crosstab Efektivitas terhadap Pemukiman Baru.....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah pesisir yang berada dikawasan perkotaan menjadi wilayah yang nyaman untuk aktifitas perekonomian masyarakat dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Seiring dengan itu, maka pertumbuhan bangunan tempat tinggal dipesisir pantai juga tidak terbendung. Perluasan wilayah pemukiman semakin meluas ditambah lagi dengan tidak didukung oleh aturan zonasi yang pasti secara hukum diwilayah pesisir pantai.

Kecenderungan masyarakat melakukan aktifitas dipusat-pusat ekonomi mendorong munculnya kawasan-kawasan permukiman penduduk yang tidak beraturan. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi penambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman. Hal ini menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan permukiman.

Menyikapi hal itu pemerintah melalui UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman,

pengecehan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukiman dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan.

Pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah. Sehingga, daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman kumuh. Permukiman kumuh ini pada umumnya memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat berat baik dari aspek fisik maupun aspek non fisik, sehingga telah menimbulkan suatu *image* bahwa kawasan permukiman kumuh identik dengan sebuah kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah yang kumuh dan kotor.

Lingkungan kumuh yaitu daerah pemukiman yang sangat padat penduduknya dan rumah-rumah didalamnya dibangun dengan teknik konstruksi yang buruk dan menggunakan bahan-bahan yang bermutu rendah. Pola pemukiman tidak berstruktur dan tidak dilengkapi dengan sarana-sarana umum seperti fasilitas air bersih, pembuangan sampah, saluran pembuangan air dan kotoran serta jalan-jalan yang bersih.

Kawasan perkotaan dan perkembangannya adalah sesuatu yang tidak



terpisahkan satu sama lain. Kawasan perkotaan dengan kompleksitas kegiatannya ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan. Adanya perkembangan di kawasan perkotaan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berdomisili dan melakukan aktivitas kesehariannya beserta ekonominya di dalam kawasan perkotaan tersebut. Hal ini mengakibatkan migrasi yang nantinya akan menambah beban perkotaan baik dari sisi ruang maupun intensitas aktivitas.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak persoalan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mampu mengantisipasi serta mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan persoalan antara lain : (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, (c) pembangunan permukiman yang tidak terkendali pada daerah-daerah non permukiman, dan (d) permukiman kumuh.

Meluasnya lingkungan permukiman di perkotaan terlebih dengan daerah pesisir pantai di kawasan perkotaan dapat menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir perkotaan,

meningkatnya potensi kerawanan dan konflik social, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman serta seringnya keluhan masyarakat miskin mengenai rendahnya kualitas lingkungan ditempat mereka bermukim (degradasi lingkungan).

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 Km<sup>2</sup> atau 9,96 % dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Dengan wilayahnya yang luas, tidak menjamin bahwa Kabupaten Bone terbebas dari persoalan kekumuhan. Terbukti bahwa terdapat ± 46 titik kawasan kumuhnya adalah berada di kawasan Perkotaan Watampone sebagai Ibukota Kabupaten Bone dengan tingkat kekumuhan yang paling tinggi adalah di sepanjang pesisir pantai kawasan perkotaan, dimana isu utama dalam kawasan permukiman kumuh adalah kemiskinan dan rendahnya kualitas dan ketersediaan prasarana lingkungan permukiman.

Rendahnya kualitas dan ketersediaan prasarana lingkungan permukiman di kawasan permukiman di Kota Watampone menjadi perhatian serius baik dari pemerintah daerah sampai pada tingkat pusat. Karena keberadaan dan ketersediaan prasarana lingkungan permukiman merupakan faktor pendukung bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat pada kawasan tersebut. Kemampuan masyarakat yang terbatas pada kawasan tersebut membuat kualitas prasarana lingkungan

permukiman kumuh tidak dapat dengan mudah ditingkatkan dan dijaga. Maka perlu upaya yang komprehensif dan kolaboratif serta berkesinambungan untuk menjaga dan memperbaiki prasarana lingkungan permukiman.

Kelurahan Toro merupakan salah satu kelurahan di Kota Watampone yang memiliki kawasan permukiman kumuh terluas di Kabupaten Bone. Kelurahan Toro sendiri memiliki luas 22,88 ha, dengan jumlah penduduk 635 KK dan populasi bangunan  $\pm$ 597 unit. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melalui program bantuan dari pemerintah pusat telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan prasarana lingkungan permukiman, dengan melibatkan organisasi masyarakat setempat di kawasan lingkungan permukiman Kabupaten Bone khususnya di kawasan kumuh Kelurahan Toro. Namun pelaksanaannya belum terasa maksimal karena bisa jadi keterbatasan sumber pendanaan ataupun disebabkan cara penanganan yang keliru. Sehingga dalam penanganan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh belum nampak efektivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yaitu mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh serta manfaat dan hasil layanan prasarana lingkungan permukiman. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih mendalam terkait sejauh mana efektivitas penanganan permukiman kumuh di perkotaan mampu memberikan efek terhadap pengurangan kekumuhan kawasan dan memberikan pengaruh serta manfaat bagi

masyarakat dalam kawasan permukiman kumuh terhadap keberadaan prasarana lingkungan permukiman tersebut.

Atas dasar pertimbangan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian yang akan disajikan didalam tesis dengan judul “Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone(Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Toro)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang sebelumnya maka melahirkan pertanyaan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi arahan serta memberikan gambaran bagi pengembangan program penanganan permukiman kumuh secara efektif.

2. Menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui program penanganan permukiman kumuh yang lebih efektif.
3. Memberikan arahan (*guidance*) serta koridor perbaikan permasalahan bagi wilayah yang akan melaksanakan program penanganan permukiman kumuh agar terlaksana dengan baik.

#### **E. Lingkup Penelitian**

1. Lingkup Materi (substansial); yaitu dibatasi pada mengukur tingkat efektivitas penanganan kawasan kumuh dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kelurahan Toro Kabupaten Bone.
2. Lingkup Wilayah (spasial); yaitu dilaksanakan di Kabupaten Bone, melihat cakupan kawasan kumuh Kabupaten Bone yang cukup luas yaitu tersebar di 46 lokasi permukiman kumuh yang kesemuanya berada di kawasan perkotaan Kabupaten Bone, maka penelitian ini secara lokasi dibatasi pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Substansi pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dalam 5 (lima) bab, yang meliputi sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan kajian pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan terkait landasan teori yang mendukung untuk menjawab rumusan pertanyaan dalam penelitian ini yang menjelaskan antara lain tentang konsepsi efektivitas, pengertian dan ukuran indikator efektivitas, konsep permukiman perkotaan mulai dari definisi permukiman, kumuh, permukiman kumuh, faktor yang menyebabkan terjadinya kekumuhan serta prasarana permukiman, selanjutnya adalah konsep dan model penanganan permukiman kumuh serta kerangka pikir dalam memahami penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa, variabel penelitian dan definisi operasional terkait variabel dan indikator penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum wilayah studi mulai dari tingkat kota sampai pada lokasi studi terpilih yaitu Kelurahan Toro, kemudian selanjutnya dalam bahasan ini juga memuat

tentang analisis serta hasil dan pembahasan mengenai efektivitas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kabupaten Bone.

## BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari rangkaian hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani (2002:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan".

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah



ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto (2005:156), “efektivitas merupakan dayapesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61).

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen,yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input),proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya meliputi ketersediaan

personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

## 2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

### 3. Indikator Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012 : 119 – 120) menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

b. Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

c. Produk kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

d. Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektivitas harus dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan.

Makmur(2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami

kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

e. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan

dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur di atas intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :



a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam artiperiodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

## **B. Pengertian Permukiman, Kumuh, dan Permukiman Kumuh**

### **1. Pengertian Permukiman**

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *humansettlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau

kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana ligkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*). Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi.

## 2. Pengertian Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Menurut kamus ilmu-ilmu sosial *Slum's* diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi daerah *slum's* dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.

*Slum's* merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai

tempat permukiman (Utomo Is Hadri,2000). Slum's yaitu permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat merosot kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 1997). Dalam kamus sosiologi Slum's yaitu diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan. (Sukamto Soerjono, 1985).

### **3. Permukiman Kumuh**

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat tadi kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan,persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah :

- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh

sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya.

d. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :

- 1) Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
- 2) Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
- 3) Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

e. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beraneka ragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

f. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

Berdasarkan salah satu ciri diatas, disebutkan bahwa permukiman kumuh memiliki ciri “kondisi hunian rumah dan

permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin". Penggunaan ruang tersebut berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul pada daerah sempadan untuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya yang kurang mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni. Dengan begitu, permukiman yang beradapada kawasan SUTET, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, dan sempadan situ/danau merupakan kawasan permukiman kumuh.

Menurut Ditjen Bangda Depdagri, ciri-ciri permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi adalah sebagai berikut

- a. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan.
- b. Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal. Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan

prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki:

- 1) Kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km<sup>2</sup>
- 2) Kepadatan bangunan > 110 bangunan/Ha.
- 3) Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan).
- 4) Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun <20% dari luas persampahan.
- 5) Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal.
- 6) Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan.
- 7) Kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya.

### **C. Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

#### **1. Program Pengadaan Perumahan Baru**

Pembangunan perumahan baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Penyediaan infrastruktur, seperti jaringan jalan, saluran sanitasi dan drainase, jaringan air bersih, jaringan listrik.
- b. Penyediaan fasilitas pendukung, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat, serta fasilitas umum lainnya.

c. Ketersediaan ruang terbuka sebagai fasilitas pendukung bagi kegiatan informal penghuninya, serta sebagai strategi mempertahankan ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.

Program pembangunan perumahan baru dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah (PERUMNAS) maupun pihak swasta. Agar penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai maka pemerintah meneluarkan kebijakan pengedaan perumahan perbandingan 1 kelas mewah : 3 kelas menengah : 6 kelas bawah bagi *developer* swasta. Kebijakan ini sesuai dengan azas keadilan, pemerataan, dan keterjangkauan.

Selain itu, untuk mendukung kemampuan kepemilikan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah, program ini didukung oleh lembaga perbankan (misalnya BTN) dengan program Kredit Pemilikan Rumah dengan suku bunga lunak. Lembaga perbankan swasta pun saat ini sudah banyak yang ikut aktif mendukung program pembangunan perumahan ini

## **2. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman**

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman merupakan suatu pola pembangunan kampung yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Program ini mempunyai prinsip universal yang berlaku dimana-mana yakni memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemanfaat sumberdaya kota

guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju. Prinsip dari program perbaikan kampung adalah perbaikan lingkungan kampung-kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan tinggi.

Metode ini berbasis pada investasi yang telah dibuat. Oleh karena itu biaya implementasinya relative lebih murah. Melalui pelaksanaan metode ini, berbagai komponen pokok prasarana / sarana dasar disediakan untuk penduduk kawasan yang bersangkutan. Di Indonesia penerapan teknik ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.

Tujuan dari Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman adalah menyediakan jalan akses, jalan setapak, saluran drainase, saluran pembuangan limbah, air bersih, dan fasilitas – fasilitas sosial seperti sekolah dan puskesmas, untuk melayani penduduk berpendapatan rendah dan menengah. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman merupakan contoh yang cukup baik dalam memperhatikan pentingnya dukungan lokal dalam implementasinya. Pada mulanya program ini bersifat *top-down* dalam perancangannya, dimana aparat pemerintah melakukan analisa dan menetapkan suatu solusi. Pada proses selanjutnya, disadari bahwa program ini sebaiknya diorganisir dengan melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan, pembangunan, maupun dalam



pemeliharaan fasilitas kawasan. Malahan pembiayaan program disalurkan melalui organisasi yang berbasis masyarakat (*community based organization*). Penduduk menjadi lebih antusias dan mereka juga mau menyumbangkan sejumlah dana bagi pembiayaan program (Choguill,1994: 111).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 11 negara yang telah melaksanakan proyek/program perbaikan perumahan dan permukiman, dapat disimpulkan hal –hal sebagai berikut :

- a. Program perbaikan perumahan dan permukiman relative lebih efektif dalam segi pembiayaan, untuk situasi dimana terdapat pemerintah akan perumahan dan sarana/prasarana pelayanan yang tinggi.
- b. Proses pelaksanaan program relative mudah dan sederhana, sehingga pelaksanaan program relative lebih cepat.
- c. Implementasi komponen – komponen untuk memperbaiki status lahan harus dilakukan secara seksama sehingga dapat meningkatkan rasa aman bagipemilikinya.
- d. Mobilitas penduduk/tumah tangga relative meningkat.
- e. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting bagi berhasilnya pelaksanaan program perbaikan perumahan dan permukiman ini, meskipun demikian pengawasan terhadap pencapaian sasaran/harapan program penting untuk diperhatikan.

Menurut Direktorat Cipta Karya, Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman,(1998). Ciri-ciri kondisi kawasan yang dapat diterapkan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman:

- a. Berada pada kawasan legal dan sesuai dengan RTR.
- b. Tingkat kepadatan tinggi, tetapi masih dalam batas kewajaran
- c. Kualitas Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU) langka dan terbatas.
- d. Belum perlu tindakan penataan menyeluruh dan *resettlement*.
- e. Dampak permasalahan bersifat lokal.

### **3. Program Peremajaan Kota**

Pada kondisi tertentu Program Peremajaan Kota (*Kampung Improvement Program/ KIP*) tidak dapat diterapkan secara efektif dan efisien karena tingginya kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas lingkungan. Pada kondisi ini harus diterapkan program peremajaan kota sebagai usaha perbaikan kualitas lingkungan. Pada program ini dilakukan pengaturan kembali struktur kota yang tidak sesuai. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki meningkatkan potensi yang sudah ada dan menimbulkan potensi yang baru, khususnya yang terkait dengan aspek ekonomi.

Karena besarnya perubahan fisik yang mungkin dilakukan pada program ini, tidak jarang sebagian penghuni harus dipindahkan sementara dari lokasi asalnya. Selanjutnya pengembalian penghuni merupakan aktifitas dengan prioritas pertama yang harus segera

dilakukan setelah program ini selesai. Program ini biasanya dilakukan pada zona-zona dengan potensi tinggi atau dengan kemungkinan pengembangan potensi yang besar, yang dinilai belum dieksplorasi secara maksimal. Pada dasarnya program ini dilakukan dengan pendanaan sendiri.

Sasaran kegiatan ini adalah peremajaan sarana prasarana yang bersifat strategis, yang biasanya berupa:

- a. Prasarana dan sarana dengan kualitas yang rendah, yang tidak layak difungsikan sesuai peruntukannya
- b. Prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kawasan yang mempunyai potensi ekonomi regional atau nasional dan atau prasarana dan sarana ekonomi yang bersekala regional dan nasional, seperti Bandar udara, pelabuhan laut, terminal sekala propinsi, pasar regional dan sebagainya.
- c. Prasarana dan sarana dikawasan-kawasan yang seringkali mengalami bencana seperti banjir, gempa, kebakaran dan lain sebagainya
- d. Prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kawasan yang mempunyai kekhususan, seperti kawasan kota lama, bersejarah, agropolitan, DPP dan sebagainya.

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwa "Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman meliputi upaya

melalui perbaikan atau pemugaran,peremajaan serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan”.

Peremajaan itu sendiri diartikan sebagai “upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perombakan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh” terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni tersebut. Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan:

- a. Secara bertahap dan sering kali mengakibatkan perubahan yang mendasar,
- b. Bersifat menyeluruh dalam suatu kawasan permukiman yang sangat tidak layak huni, yang secara fisik sering tidak sesuai lagi dengan fungsi kawasan semula.
- c. Difokuskan pada upaya penataan menyeluruh terhadap seluruh kawasan hunian kumuh, rehabilitasi dan atau penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang menunjang fungsi kawasan ini sebagai daerah hunian yang layak.
- d. Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya.

Dengan demikian, peremajaan merupakan salah satu bentuk bantuan program yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas permukiman. Dalam perjalanan pelaksanaannya, program peremajaan telah mengalami berbagai

perubahan dan penyempurnaan, baik dalam mekanisme pelaksanaan, cakupan program bahkan dalam pendekatan dasarnya.

#### **D. Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh**

##### **1. Pencegahan**

Pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Pelaksanaan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai rencana pembangunan daerah.

##### **a. Pengawasan dan pengendalian**

- Perizinan, pada tahap perencanaan yang dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti (izin prinsip, izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lain). Untuk menjamin: kesesuaian dengan rencanan tata ruang, serta keterpaduan rencana pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum
- Standar Teknis, pada tahap pembangunan dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis seperti (bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaan air minum; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persampahan; dan proteksi kebakaran). Untuk menjamin terpenuhinya: sistem

pelayanan, kuantitas kapasitas, serta kualitas bahan dan pelayanan

- Kelaikan Fungsi, pada tahap pemanfaatan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Seperti (kelaikan bangunan gedung, kelaikan jalan lingkungan, kelaikan air minum, kelaikan drainase lingkungan, kelaikan air limbah, kelaikan persampahan, kelaikan proteksi kebakaran). Untuk menjamin: sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan kualitas bahan, serta keberfungsian.

b. Pemberdayaan masyarakat

- Pendampingan, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat
  - Penyuluhan, kegiatan dalam rangka memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuhan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam bentuk : sosialisasi dan diseminasi
  - Bantuan Teknis, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang bersifat teknis, dalam bentuk Fisik : fasilitasi pemeliharaan, perawatan, dan/atau perbaikan (bangunan gedung; jalan lingkungan; drainase lingkungan; sarpras air

minum; sarpras air limbah; sarpras persampahan; atau sarpras persampahan. Non Fisik: (fasilitasi penyusunan perencanaan; fasilitasi penyusunan NSPK; fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan; fasilitasi alternatif pembiayaan; fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta).

- Pembimbingan, kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.  
Dalam bentuk: pembimbingan kepada kelompok masyarakat, pembimbingan kepada masyarakat perorangan, pembimbingan kepada dunia usaha.
- Pelayanan Informasi, kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pelayanan informasi terhadap: rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, standar teknis dalam bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **2. Peningkatan Kualitas**

- a. Pemugaran, adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

b. Peremajaan, kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.

c. Pemukiman kembali, kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

### **E. Pengertian Pengawasan**

Kadarman (2001:159), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikanyang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam setiap kegiatan yang akan diselenggarakan, pengawasan selalu dibutuhkan. Dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan akan dapat terjadi dengan cara yang efektif dan efisien. Karena melalui pengawasan diusahakan agar setiap tindakan atau perbuatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada.

Selanjutnya Handoko (2003:359), mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas



manajerial dan ia mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi) performa pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar.

Sebagai pendukung terhadap definisi diatas, maka Manullang(2002:173), menegaskan bahwa pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tindakan penting guna mengetahui apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam suatu organisasi tersebut. Pengawasan juga merupakan tugas dan tanggung jawab penting dari seorang pemimpin,agar jika terjadi kesalahan dapat segera melakukan tindakan perbaikan sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien kembali.

Pengawasan menurut (UU Penataan Ruang) adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk :

- Pelaporan adalah usaha atau kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.Pemantauan adalah usaha

atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan rutin terhadap perubahan tata ruang dan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing dengan mempergunakan semua laporan yang masuk, baik yang berasal dari individu masyarakat. Organisasi kemasyarakatan, aparat RT, RW, kelurahan dan kecamatan.

- Pemantauan ini menjadi kewajiban perangkat Pemerintah Daerah sebagai kelanjutan dari temuan pada proses pelaporan yang kemudian ditindak lanjuti bersama-sama berdasarkan proses dan prosedur yang berlaku.
- Evaluasi adalah usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Inti evaluasi adalah menilai kemajuan seluruh kegiatan pemanfaatan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi dilakukan secara terus menerus dengan membuat potret tata ruang. Setiap tahunnya hal ini dibedakan dengan kegiatan peninjauan kembali yang diamanatkan UU Penataan Ruang. Peninjauan kembali adalah usaha untuk menilai kembali kesahihan rencana tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan ruang secara berkala, termasuk mengakomodasi pemuktahiran yang dirasakan perlu akibat paradigma serta peraturan atau rujukan baru dalam kegiatan

perencanaan tata ruang yang dilakukan setelah dari kegiatan suatu evaluasi ditemukan permasalahan permasalahan yang mendasar.

## **F. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota.

### **1. Peraturan Zonasi Kota**

Peraturan zonasi kota adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Ketentuan umum peraturan zonasi kota berfungsi sebagai:

- landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kota;
- dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
- salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

Ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:

- struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
- karakteristik wilayah;
- arahan umum desain kota; dan
- peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

## 2. Perizinan

Perizinan adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang;

Ketentuan perizinan berfungsi sebagai:

- alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
- rujukan dalam membangun.

Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:

- ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan
- ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang:

- izin prinsip;
- izin lokasi;
- izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- izin mendirikan bangunan; dan
- izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 3. Pemberian Insentif

Pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang;

Ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai:

- perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- katalisator perwujudan pemanfaatan ruang.

Ketentuan pemberian insentif disusun berdasarkan:

- struktur ruang dan pola ruang wilayah kota
- ketentuan umum peraturan zonasi kota; dan
- peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat diberikan dalam bentuk:

- pemberian kompensasi;
- subsidi silang;
- penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- publikasi atau promosi daerah.

Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:

- pemberian kompensasi;
- pengurangan retribusi;
- imbalan;
- sewa ruang dan urun saham;
- penyediaan prasarana dan sarana;
- penghargaan; dan/atau

- kemudahan perizinan.

#### **4. Pemberian Disinsentif**

Pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang. Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ketentuan pemberian disinsentif disusun berdasarkan:

- struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
- ketentuan umum peraturan zonasi kota; dan
- peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat diberikan dalam bentuk:

- pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
- pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:

- pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
- pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
- pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Ketentuan disinsentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.

## **5. Sanksi**

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kota.

Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan;
- penghentian sementara pelayanan umum;
- penutupan lokasi;
- pencabutan izin;
- pembatalan izin;
- pembongkaran bangunan;
- pemulihan fungsi ruang;

## **G. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan

kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.



## H. Teori Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002).

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem

tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

2. Rehabilitasi ekonomi merupakan revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*).

3. Revitalisasi sosial/institusional Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan

lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

### **I. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan terkait efektivitas penanganan permukiman kumuh yang dilakukan sebelumnya memiliki penekanan yang berbeda. Misalkan, Zaenal Mutaqin (2017) meneliti tentang Studi Penentuan Prioritas Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Menuju Kampung Berkelanjutan ( Studi Kasus: Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang). Dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian penentuan kriteria prioritas dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh diperkotaan dalam kerangka 3 pilar pembangunan berkelanjutan berturut-turut adalah aspek lingkungan sebesar 46,7%, aspek sosial sebesar 31,2% dan aspek ekonomi sebesar 22,1%. Sedangkan untuk kegiatan kegiatan yang menjadi prioritas adalah mengelola sampah rumah tangga sebesar 100 %, sarana persampahan sebesar 93,5 %, kegiatan gotong royong sebesar 83,6%, drainase lingkungan sebesar 66,2 %, sanitasi sebesar 66,1 %, pinjaman modal usaha sebesar 63,0 %, pelatihan dan kewirausahaan sebesar 61%. Selanjutnya berdasarkan kegiatan prioritas tersebut, maka dari 12 lokasi yang dianalisis, diperoleh 5 wilayah prioritas yaitu RT 30, 31, 35, 02, dan RT 01. Kawasan prioritas ini merupakan wilayah yang memiliki kualitas

lingkungan permukiman yang rendah, dimana kualitas sarana dan prasarannya yang ada saat ini kurang memadai.

Wahyu Nugroho (2017) *Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Di Pancuran Kota Salatiga*. Menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki beberapa program untuk mengentaskan permukiman kumuh di Pancuran. Program tersebut adalah berupa Perbaikan rumah, pembuatan IPAL Komunal Perpipaan, pembangunan balai RW dan perbaikan Infrastruktur. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah karena ketiadaan lahan, rendahnya penghasilan, perilaku masyarakat, kepemilikan lahan dan status lahan, dan kurang tegasnya penegakan hukum. Dalam melaksanakan program. Sosialisasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan aktif dari masyarakat namun sayangnya kegiatan tersebut kini sudah tidak berlanjut. Sedangkan koordinasi yang dilakukan bersama masyarakat kurang maksimal karena mereka terkesan saling menyalahkan satu sama lain.

Erwin & Firmansyah (2016) *Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Bandung (Kelurahan Nyengseret)*. Dari beberapa kajian seperti kepadatan bangunan, kepemilikan tanah, kepadatan penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi kajian ternyata pendekatan konsep yang diterapkan adalah konsep Peningkatan Kualitas Lingkungan dan

peremajaan kota. Konsep ini dapat dilaksanakan apabila seluruh komponen masyarakat, terutama Pemerintah Kota Bandung dan swasta bersama – sama dalam mengimplementasikan konsep penanganan tersebut. Konsep ini diharapkan dapat mendorong partisipasinya masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kapasitas komunitas dalam rangka pemberdayaan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang mencakup kegiatan sosialisasi program, perencanaan partisipatif dan pelaksanaan pembangunan fisik secara bersama – sama.

Tri Rahayu, Sudaryono, dan M. Baiquni (2003) Evaluasi Program Penataan Dan Rehabilitasi Permukiman Kumuh Studi Kasus Kawasan Bantaran Sungai Code Bagian Utara, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif. Hasilnya di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Program tersebut memiliki 3 komponen: (1) penyediaan air, (2) jalan setapak, (3) limbah padat. Dari setiap komponen program dapat dikembangkan 3 tema yaitu masalah sebelum adanya program, benefit dan dampak dari program, serta tanggapan terhadap program. Tema-tema ini dikelompokkan ke dalam beberapa konsep. Terdapat 2 katagori: 2 program berisikan penyediaan air, jalan setapak dapat dicapai, tetapi program limbah padat tidak dapat dikembangkan lagi.

#### **J. Perumusan Variabel dan Indikator**

Untuk mengukur tingkat efektivitas penanganan kumuh perkotaan pada kawasan penelitian, digunakan beberapa variabel serta indikator pendukungnya yang diambil dari pengkajian beberapa teori untuk

menjawab permasalahan tersebut. Adapun variabel dan indikator yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

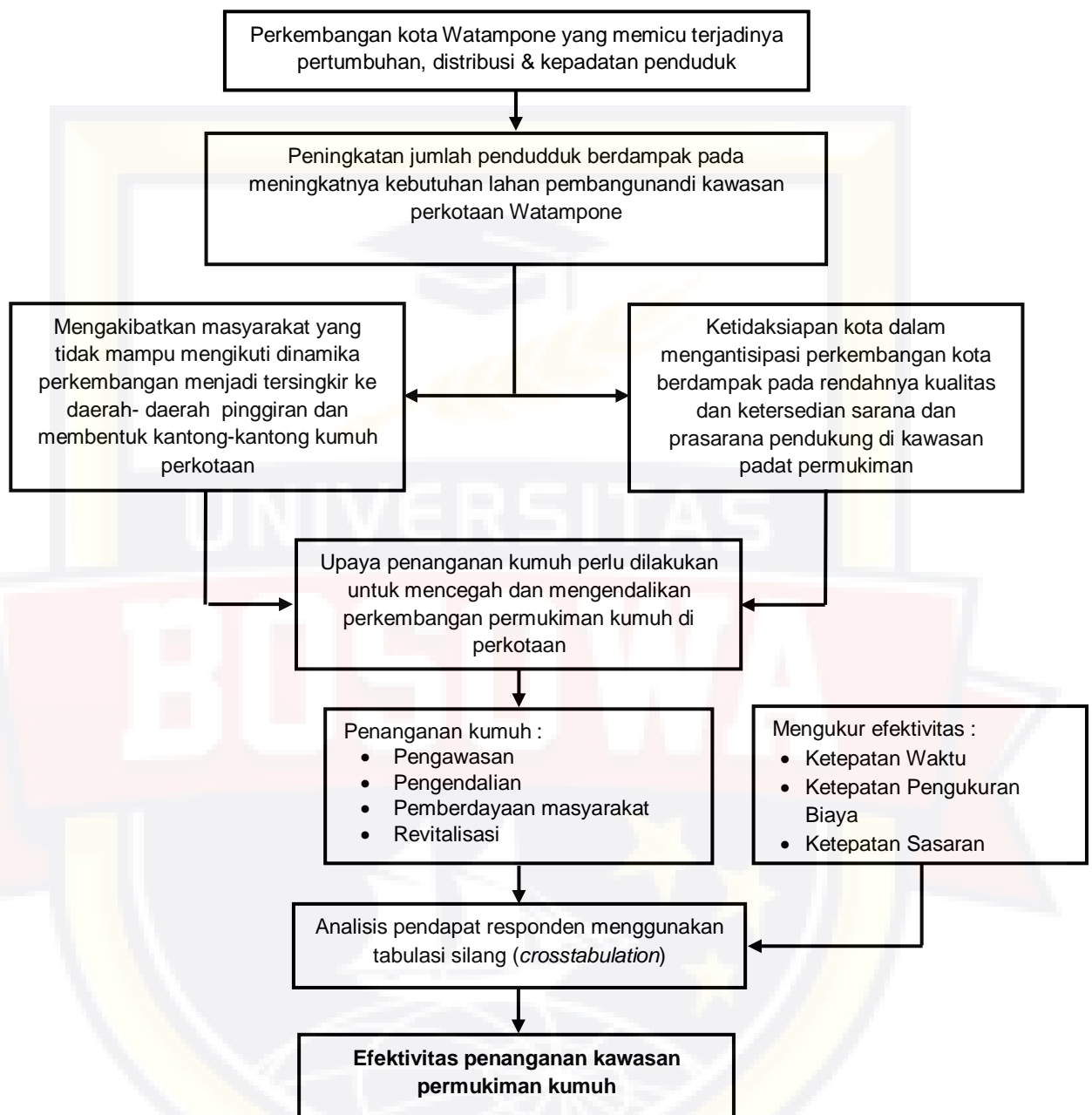
**Tabel 2.1 Rumusan Variabel dan Indikator**

<b>Teori</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Efektivitas (Makmur, 2011)	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Waktu</li> <li>• Ketepatan Pengukuran Biaya</li> <li>• Ketepatan Sasaran</li> </ul>
Pengawasan (Kadarman, 2001)	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring</li> <li>• Evaluasi</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>
Pengendalian Ruang (Permen PU, 2009)	Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Zonasi</li> <li>• Perizinan</li> <li>• Insentif</li> <li>• Disinsentif</li> <li>• Sanksi</li> </ul>
Pemberdayaan (Mubarak, 2010)	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Pemeliharaan</li> </ul>
Revitalisasi (Danisworo, 2002)	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemugaran</li> <li>• Peremajaan</li> <li>• Pemukiman Baru</li> </ul>

Sumber : Hasil Pengolahan, 2018

## **K. Kerangka Pikir**

Dalam upaya menjelaskan secara garis besar pola substansi dalam penelitian ini, maka dihadirkanlah kerangka pikir untuk menjelaskan pola tersebut dalam bentuk skema atau bagan seperti dibawah ini :



Gambar : Bagan Kerangka Pikir Penelitian,  
Sumber : Hasil Pengolahan 2018

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis dan metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian terapan. Dimana Gay (1977) dalam Sugiyono (2014:4) menyatakan bahwa Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Sedangkan berdasarkan kealamian tempat penelitian, jenis dan metode penelitian ini menggunakan metode survei yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (sugiyono, 2014:5).

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian rasionalistik-positivistik dimana studi dilakukan melalui kajian-kajian teori dan kajian kajian dokumen untuk mencari dan menyusun parameter-parameter serta indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur fisik dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman, selanjutnya parameter – parameter tersebut diterapkan untuk mencari pembuktian secara empiris dengan berdasarkan data yang ada dan ditemukan dilapangan. Penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan evaluasi kegiatan penanganan dan penataan lingkungan



permukiman, dimana evaluasi dibatasi pada evaluasi efektivitas. Evaluasi efektivitas merupakan evaluasi yang menguji apakah tindakan dari kegiatan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (tangkilisan, 2005). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membuktikan efektivitas tingkat pencapaian tujuan dari diadakannya penanganan permukiman melalui pembangunan prasarana dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman.

Berdasarkan uraian pendekatan penelitian tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Dengan demikian peneliti dapat menentukan variabel – variabel dari objek yang diteliti kemudian membuat parameter dan indikator untuk dijadikan ukuran efektivitas.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini difokuskan pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur, seluas 22,88 Ha. Berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut prioritas kawasan yang tertangani dengan jumlah rumah tangga sebanyak 750 KK dan terluas kawasan kumuh dari 46 lokasi kawasan kumuh.

### **2. Waktu Penelitian**

Jangka waktu penelitian ini akan ditentukan oleh keberadaan sumber data, interest dan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang dibangun maka waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 (dua) bulan.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Untuk menunjang penelitian ini, diperlukan beberapa data selain digunakan sebagai informasi dan obyek penelitian juga dipergunakan sebagai bahan atau dasar dalam mengkaji dan menganalisis efektivitas penataan lingkungan permukiman melalui pengembangan infrastruktur fisik terhadap penurunan kawasan permukiman kumuh di lokasi penelitian. Data-data yang dibutuhkan antara lain program/kegiatan pengembangan infrastruktur melalui program/kegiatan penataan lingkungan permukiman, data pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di lokasi penelitian, data terkait hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman kumuh di lokasi

penelitian. Selain itu perlu juga diperkuat dengan data penunjang lainnya yang terkait dengan penataan lingkungan permukiman melalui pengembangan infrastruktur fisik kawasan permukiman dan program/kegiatan penataan lingkungan permukiman berupa aturan dan kebijakan serta perundang-undangan, data profil kawasan, dokumen perencanaan dan literatur lainnya yang diperoleh melalui instansi terkait dan melalui media lainnya. Berikut rincian data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Data yang dibutuhkan dalam penelitian**

No	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Ket.
<b>I</b>	<b>Data Primer</b>			
1	Jenis dan sebaran prasarana lingkungan permukiman	Primer/Informasi langsung	Lapangan dan Master plan infrastruktur Kelurahan Toro	Observasi dan Dokumentasi
2	Tinjauan Hasil dan Identifikasi Permukiman Kumuh sebelum dan setelah Penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Primer/Informasi langsung	Masyarakat, pengguna aktual, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintahan (Kelurahan, Kecamatan Instansi Terkait)	Survei, Observasi, Wawancara dan Serta Kajian Dokumen Literatur
3	Akses dan Layanan Prasarana lingkungan Permukiman	Primer/informasi langsung	Masyarakat berdasarkan populasi sampel terpilih / responden	Kuesioner
4	Manfaat dan Hasil Peningkatan Kualitas Prasarana lingkungan Permukiman	Primer/informasi langsung	Masyarakat berdasarkan populasi sampel terpilih / responden	Kuesioner
5	Sumber Daya dan Kelembagaan dalam mendukung kegiatan penanganan permukiman kumuh	Primer/Informasi Langsung	Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah.	Wawancara dan Dokumentasi

<b>II Data Sekunder</b>				
<b>1</b>	Profil Wilayah dan Data prasarana lingkungan Permukiman di Lokasi Studi	Sekunder/ informasi tidak langsung	BPS, Dinas PKPP dan Dinas PU&PTR dan Bappeda	Dokumen
<b>2</b>	Program/Kebijakan Penanganan Permukiman kumuh	Sekunder/ informasi tidak langsung	Dinas PKPP, Dinas PU&PTR dan Bappeda	Dokumen
<b>3</b>	- Kegiatan penataan prasarana lingkungan permukiman ( Tujuan dan Sasaran) - Kegiatan penataan prasarana lingkungan permukiman (Konsep dan Model Penanganan)	Sekunder/ informasi tidak langsung	Dinas PU&PTR, Dinas PKPP dan Bappeda dan Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen
<b>4</b>	Dokumen Perencanaan, Dokumen Kebijakan Program dan Peraturan Perundang-undangan tentang Permukiman	Sekunder/ informasi tidak langsung	Dinas PPKP, Dinas PKPP dan Bappeda	Dokumen
<b>5</b>	Kajian Literatur Kepustakaan efektivitas penanganan permukiman kumuh perkotaan terhadap tingkat pengurangan kekumuhan kawasan	Sekunder/informasi tidak langsung	buku-buku, website, makalah, karya ilmiah, studi penelitian	literatur

Sumber : Hasil Pengolahan, 2018

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Metode Observasi**

Metode ini dilakukan dengan cara survei dan pengamatan langsung ke daerah studi untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti seperti Kondisi lokasi, sarana dan prasarana dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## **2. Metode Wawancara**

Dilakukan dengan cara tanya-jawab dan diskusi langsung pada masyarakat setempat yang berada pada lokasi permukiman kumuh di kelurahan Toro, diskusi dan wawancara langsung dengan instansi yang terkait yaitu dengan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bone, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bone, Camat Tanete Riattang Timur, serta Lurah Kelurahan Toro.

## **3. Metode Pertanyaan (*Questioner*)**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menyajikan beberapa pertanyaan dalam bentuk tertulis. Pertanyaan ditujukan kepada masyarakat yang bermukim di Lokasi Penelitian.

## **4. Pendataan Instansional**

Teknik pengumpulan data melalui insatansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian. instansi yang dimaksud adalah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bone, Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone, Kantor Kecamatan Tanete Riattang Timur, serta Kantor Lurah Kelurahan Toro.

## **5. Kepustakaan (*Library Research*)**

Adalah cara pengumpulan data dan informasi melalui literatur yang terkait dengan studi seperti Literatur yang terkait dengan permukiman kumuh pesisir pantai, dan yang berhubungan dengan studi yang diperoleh melalui literatur, makalah ilmiah, dan internet.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari satuan-satuan elementer yang mempunyai karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama. Karakteristik dasar mana dicerminkan dalam bentuk ukuran-ukuran tertentu. (Yunus, 2010 : 260)

Populasi dalam penelitian ini mengacu dari data Badan Pusat Statistik, dan hasil observasi penelitian dengan melakukan deliniasi lokasi permukiman kumuh di kelurahan Toro. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan jumlah populasi pada lokasi penelitian sebesar 750 KK.

Arikunto dalam Riduwan, dkk. (2007:39) mengatakan Sampel adalah bagian dari anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili dari seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di empat lokasi penelitian. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini diambil secara acak random dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane Dalam Riduwan, dkk (2007:44):

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah KK di setiap lokasi penelitian.

d = Derajat yang ditetapkan (0,1)

Karena jumlah populasi telah diketahui yaitu 750 KK, maka dengan menggunakan persamaan diatas dapat dilakukan perhitungan jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{750}{750 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = 88,24 \text{ KK} \quad n = 88 \text{ KK}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka total sampel yang akan diteliti pada lokasi penelitian yaitu 88 KK.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul maka yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan (Sugiyono, 2014).

Data yang diperoleh dari hasil penelitian biasanya masih dalam bentuk data kasar yang masih memerlukan interpretasi lebih lanjut. Analisis data merupakan hal yang sangat penting karena dengan melakukan analisa, maka data yang diperoleh dapat diberi arti dan makna

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1988: 405). Analisis data dalam penelitian ini digambarkan dalam uraian sebagai berikut. Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data, kemudian selanjutnya di olah dalam kerangka analisis, yang secara berturut turut sebagai berikut :

- Pengelompokan data dan pengorganisasian data dalam rangkaian untuk melakukan scoring.
- Selanjutnya melakukan pengolahan data dari hasil perhitungan data.
- Selanjutnya menyimpulkan berdasarkan hasil pengolahan data.
- Selanjutnya pendekatan analisis kualitatif-kuantitatif menggunakan tabel silang (*crosstabulation*)

### **1. Metode Tabulasi Silang (Crosstab)**

Tabulasi Silang (*Crosstab*) adalah metode analisis yang menggunakan data nominal, ordinal, interval serta kombinasi diantara data tersebut. Analisis tabulasi silang (*crosstab*) adalah teknik untuk melihat atau membandingkan hubungan antar variabel (minimum 2 variabel) dengan menghitung persentase responden untuk setiap kelompok dalam kategori agar mudah dilihat hubunganantara dua variable. Kegunaan analisis tabulasi silang (*crosstab*), khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota adalah:

- a. Membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif. Penentuan hubungan tersebut digunakan sebagai dasar



untuk penentuan tindakan perencanaan. Dengan analisis tabulasi silang berdasarkan pada data primer yang telah diperoleh didapat suatu uji statistik yang nantinya akan diperoleh kesimpulan mengenai hubungan antara dua variabel.

- b. Dapat mengetahui keterkaitan antar variabel yang dijadikan sampel. Tingkat keterkaitan ditunjukkan dengan bilangan 0-1 yang menunjukkan derajat keterkaitan rendah hingga sangat rendah.
- c. Dapat menentukan variabel *dependent* (terikat) dan variabel *independent* (tidak terikat) dari dua variabel yang dianalisis. Salah satu keluaran dari analisis tabulasi silang adalah penentuan dua variabel terikat dan tidak terikat yang ditunjukkan oleh *statistik lambda* atau *eta*.

Dapat dilihat dari kegunaannya bahwa analisis tabulasi silang ini akan sangat membantu perencana dalam menganalisis pada tahap selanjutnya, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis tabulasi silang dapat berguna apabila data yang diperoleh merupakan data dalam bentuk kategori yang diperoleh dari survei primer di lapangan.

## 2. Metode Pendukung

Pada analisis tabulasi silang (*crosstab*) mempunyai metode pendukung seperti Uji Chi Kuadrat Person (*Person Chi-square Test*). Uji chi kuadrat ini adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorik (data kualitatif) yaitu

variabel kolom dan variabel baris dalam suatu tabulasi silang. Pada uji ini digunakan tabel kontingensi dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom c (tabel kontingensi r x c). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah:

$H_0$  = tidak ada hubungan antara baris dan kolom

$H_1$  = ada hubungan antara baris dan kolom

Statistik ujinya adalah :

$$E_{ij} = \frac{(R_i \times C_j)}{N}$$

$$X^2 = \sum \frac{\sum (O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan:

R = Banyaknya baris

C = Banyaknya kolom

$O_{ij}$  = Frekuensi observasi pada baris ke-I dan kolom ke-j

$E_{ij}$  = Frekuensi harapan pada baris ke-I dan kolom ke-j

Dasar pengambilan keputusan :

a. Berdasarkan perbandingan Chi-Square Uji dan tabel

- Jika Chi-Square hitung < Chi-Square tabel, maka  **$H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak.**
- Jika Chi-Square hitung > Chi-Square tabel, maka  **$H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima.**

b. Berdasarkan probabilitasnya

- Jika probabilitasnya >  $\alpha$ , maka  **$H_0$  diterima.**
- Jika probabilitasnya <  $\alpha$ , maka  **$H_0$  ditolak.**

Uji Chi-kuadrat yang dihasilkan harus dibandingkan dengan titik kritis dan distribusi teoritis Chi-kuadrat untuk menentukan apakah kedua variabel benar-benar independent. Untuk itu diperlukan juga derajat kebebasan (*Degree Of Freedom/df*) dari tabel. Derajat kebebasan untuk tabel yang terdiri dari m baris dan n kolom adalah:

$$(m - 1) \times (n - 1)$$

Keterangan:

M = baris

N = Kolom

Uji Chi-kuadrat hanyalah uji independensi, sehingga hanya sedikit memberikan informasi mengenai kekuatan atau bentuk asosiasi di antara dua variabel. Harga yang dihasilkan bergantung pada ukuran sampel dan mode independensi. Chi-kuadrat akan bertambah apabila ukuran sampel pada tabel ditambah, harga dari Chi-kuadrat dapat dilihat melalui residuak yang relatif kecil untuk frekuensi harapan akan tetapi ukuran sampelnya besar.

### **G. Variabel Penelitian**

Berdasarkan pendekatan teori yang diadopsi, maka variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penanganan permukiman kumuh yang ada di kawasan permukiman kumuh kelurahan Toro yang antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Variabel dan Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator
Efektivitas (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Waktu</li> <li>• Ketepatan Pengukuran Biaya</li> <li>• Ketepatan Sasaran</li> </ul>
Pengawasan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring</li> <li>• Evaluasi</li> <li>• Pelaporan</li> </ul>
Pengendalian (X2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Zonasi</li> <li>• Perizinan</li> <li>• Insentif</li> <li>• Disinsentif</li> <li>• Sanksi</li> </ul>
Pemberdayaan Masyarakat (X3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Pemeliharaan</li> </ul>
Revitalisasi (X4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemugaran</li> <li>• Peremajaan</li> <li>• Pemukiman Baru</li> </ul>

Sumber : Hasil Pengolahan, 2018

#### **H. Defenisi Operasional Penelitian**

Definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

- **Efektivitas**, adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan cara mengukur tingkat ketepatan waktu, ketepatan pengukuran biaya, dan ketepatan sasaran.
- **Pemberdayaan Masyarakat**, adalah proses pembangunan sumber daya manusia/ masyarakat yang diukur dengan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

- **Pengawasan**, adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil dimana diukur menggunakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- **Pengendalian Ruang**, adalah ketentuan yang dibuat dan diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang yang diukur dengan peraturan zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, dan sanksi.
- **Revitalisasi**, adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya dengan cara mengukur persepsi masyarakat terhadap pemugaran, peremajaan, dan pemukiman baru.

**BOSOWA**



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Bone**

##### **1. Aspek Fisik Wilayah**

Tinjauan aspek fisik wilayah Kabupaten Bone secara makro, dimaksudkan untuk memberikan gambaran kondisi fisik wilayah Kabupaten Bone, serta orientasi kawasan perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas. Hal ini dapat memudahkan dalam melakukan kajian terhadap aspek fisik dalam rangka pengembangan BWP Watampone yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan hirarki struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam konteks tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **a. Letak Geografis dan Administratif**

Kabupaten Bone berada pada bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Bone terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) desa dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan. Pusat pemerintahan daerah terletak di Kota Watampone, sekaligus sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Bone memiliki luas wilayah 4.559 Km<sup>2</sup>. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bontocani yaitu seluas 463,35 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluas 23,79 Km<sup>2</sup>.

Tabel: 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Bone, Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1	Bontocani	463,35	10.16
2	Kahu	189,50	4.16
3	Kajuara	124,13	2.72
4	Salomekko	84,91	1.86
5	Tonra	200,32	4.39
6	Patimpeng	130,47	2.86
7	Libureng	344,25	7.55
8	Mare	263,50	5.78
9	Sibulue	155,80	3.42
10	Cina	147,50	3.24
11	Barebbo	114,20	2.50
12	Ponre	293,00	6.43
13	Lappariaja	138,00	3.03
14	Lamuru	208,00	4.56
15	Tellu Limpoe	318,10	6.98
16	Bengo	164,00	3.60
17	Ulaweng	161,67	3.55
18	Palakka	115,32	2.53
19	Awangpone	110,70	2.43
20	Tellu Siattinge	159,30	3.49
21	Amali	119,13	2.61
22	Ajangale	139,00	3.05
23	Dua Boccoe	144,90	3.18
24	Cenrana	143,60	3.15
25	Tanete Riattang Barat	53,68	1.18
26	Tanete Riattang	23,79	0.52
27	Tanete Riattang Timur	48,88	1.07
JUMLAH		4.559,00	100

Sumber : Kab. Bone dalam angka thn 2018.

Kabupaten Bone terletak pada posisi 4° 13' - 5° 6' LS dan antara 119° 42' - 120° 40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 Km yang membentang dari selatan ke utara. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Maros, dan Gowa.





## **2. Aspek Kependudukan/Demografi**

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sumberdaya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumberdaya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka Pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja, tetapi lebih menekankan ke arah perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

**Tabel: 4.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone, Tahun 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	KEPADATAN (JIWA/KM <sup>2</sup> )
1	Bontocani	15.558	463,35	34
2	Kahu	38.166	189,50	201
3	Kajuara	35.629	124,13	287
4	Salomekko	15.288	84,91	180
5	Tonra	13.290	200,32	66
6	Patimpeng	16.178	130,47	124
7	Libureng	29.581	344,25	86
8	Mare	26.028	263,50	99
9	Sibulue	33.529	155,80	215
10	Cina	26.007	147,50	176
11	Barebbo	27.059	114,20	237
12	Ponre	13.577	293,00	46
13	Lappariaja	23.547	138,00	171
14	Lamuru	24.680	208,00	119
15	Tellu Limpoe	13.954	318,10	44
16	Bengo	25.380	164,00	155
17	Ulaweng	24.428	161,67	151
18	Palakka	22.400	115,32	194
19	Awangpone	29.034	110,70	262
20	Tellu Siattinge	39.932	159,30	251
21	Amali	20.653	119,13	173
22	Ajangale	27.337	139,00	197
23	Dua Boccoe	30.096	144,90	208
24	Cenrana	23.810	143,60	166
25	Tanete Riattang Barat	46.244	53,68	861
26	Tanete Riattang	50.573	23,79	2.126
27	Tanete Riattang Timur	41.961	48,88	858
	<b>JUMLAH</b>	<b>734.119</b>	<b>4.559,00</b>	<b>161</b>

Sumber : Kab. Bone dalam angka thn 2018

Penduduk Kabupaten Bone berjumlah 734.119 jiwa yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanete Riattang, yakni 50.573 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone pada Tahun 2018 mencapai 161 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan

Tanete Riattang, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.126 jiwa/km<sup>2</sup>, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bontocani dengan angka kepadatan 34.

### **3. Aspek Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kabupaten Bone akan ditinjau secara garis besar berdasarkan pada gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone. Selain itu, juga dilihat bagaimana perkembangan dan kontribusi dari setiap sektor ekonomi dalam mendukung perekonomian wilayah, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Struktur perekonomian Kabupaten Bone yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor mampu memberikan gambaran kemampuan masing-masing sektor dalam menyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Bone. Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku, pada 2 (dua) tahun terakhir dari periode Tahun 2017 - 2018, terdapat 2 (dua) sektor utama dalam menyumbang struktur perekonomian Kabupaten Bone, yaitu sektor pertanian, dan jasa-jasa. Berikut ini tabel yang memperlihatkan perkembangan PDRB Kabupaten Bone kurun waktu Tahun 2017 - 2018.

**Tabel: 4.3. Perkembangan PDRB di Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Berlaku (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2017 - 2018**

NO	LAPANGAN USAHA	2 (DUA) TAHUN	
		TH. 2012	TH. 2013
1.	Pertanian	4.899.548,63	5.430.074,52
2.	Pertambangan & Penggalian	70.982,97	84.855,38
3.	Industri Pengolahan	691.259,08	784.247,77
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	76.051,06	89.605,12
5.	Bangunan	888.558,33	1.068.608,83
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	921.678,46	937.158,83
7.	Angkutan & Komunikasi	457.195,47	526.530,88
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	613.495,98	784.720,09
9.	Jasa-jasa	1.854.218,90	2.119.064,51
<b>JUMLAH</b>		<b>10.372.888,85</b>	<b>11.788.865,91</b>

Sumber: Kab. Bone Dalam Angka, Th. 2014

Pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, sektor pertanian berperan dalam menciptakan kegiatan perekonomian pada sektor primer, yaitu sebesar 4.899.548,63 Rupiah pada Tahun 2017 dan 5.430.074,52 Rupiah pada Tahun 2018 dan sektor jasa-jasa menyumbang sebesar 1.854.218,90 Rupiah pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 sebesar 2.119.064,51 Rupiah pada PDRB Kabupaten Bone. Begitu pula dengan sektor perdagangan, hotel & restoran yang memberikan nilai tambah sebesar 921.678,46 Rupiah pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 sebesar 937.158,83 Rupiah.

#### **4. Aspek Sosial/Kebudayaan**

Kabupaten Bone adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya beraneka ragam. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Kabupaten Bone yang merupakan salah satu wilayah kerajaan besar di nusantara yang tentunya meninggalkan banyak kebudayaan dan

adat-istiadat yang beberapa diantaranya masih bertahan hingga sekarang.

Keberadaan budaya-budaya lokal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah wilayah. Nilai-nilai budaya lokal yang luhur tentunya akan memberikan sumbangsih yang cukup baik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir.

Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Bone dan juga budaya Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Bone menganut Agama Islam. Peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Bone, antara lain berupa masjid kuno, makam para tokoh, dan bangunan-bangunan istana. Untuk menjaga kelestarian benda-benda yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Bone, Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin melakukan kegiatan perawatan terhadap situs-situs peninggalan budaya tersebut.

## **B. Gambaran Umum Wilayah (Kecamatan Tanete Riattang Timur)**

### **1. Aspek Fisik Dasar**

Aspek aspek fisik Kota Watampone (Kec. Tanete Riattang Timur) dimaksudkan untuk memberikan gambaran/profil terhadap kondisi fisik kawasan, dalam hal kemampuan menerima beban pembangunan

yang ada di atasnya. Aspek fisik yang ditinjau meliputi letak dan luas wilayah, kondisi topografi/kelerengan, kondisi geologi, jenis tanah, dan berbagai aspek fisik lainnya.

#### **a. Topografi dan Kelerengan**

Kawasan Indikator pengembangan wilayah ataupun kawasan pemukiman dapat ditinjau dari kondisi topografi/kemiringan lerengnya, ini dimaksudkan untuk mengamati dan mengkaji areal-areal potensial pengembangan dan kawasan limitasi pengembangan serta areal yang perlu penanganan khusus untuk kepentingan pembangunan. Selain itu sangat penting juga untuk perencanaan drainase perkotaan atau pengaturan tata air perkotaan.

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng (Kec. Tanete Riattang), secara umum merupakan kawasan yang relatif baik untuk dikembangkan dengan tingkat kelerengan yang datar sampai landai. Hal tersebut sangat memungkinkan mengarahkan pembangunan untuk wilayah terbangun dengan didukung tata air/drainase yang baik untuk mencegah terjadinya genangan air akibat perlambatan arus air sebagai pengaruh topografi yang relatif datar. Pada Kecamatan Tanete Riattang Timur memiliki dua karakteristik kemiringan lereng yaitu antara 0 - 2% dan 2 - 5%.

## **b. Tutupan Lahan**

Tutupan lahan pada (Kec. Tanete Riattang Timur) secara umum terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung umumnya berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemakaman, dan sempadan sungai. Sementara itu kawasan budidaya didominasi oleh kawasan terbangun dengan berbagai fungsi ruang (klasifikasi pemanfaatan ruang), dan kawasan tidak terbangun, berupa lahan kosong, kebun campuran, areal persawahan.

## **2. Pertumbuhan Penduduk**

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun tertentu terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi/perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Data jumlah penduduk (Kec. Tanete Riattang Timur) 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada Tahun 2013 sebanyak 82.140 jiwa, sedangkan pada Tahun 2018 mencapai 88.305 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya peningkatan penduduk secara signifikan setiap tahunnya, selama

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel: 4.4. Perkembangan Penduduk (Kec. Tanete Riattang Timur) Kurun Waktu 5 (lima) Tahun Terakhir (Tahun 2013 - 2017)**

NO	KECAMATAN	TAHUN (JIWA)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanete Riattang Timur	39.786	40.393	41.081	41.450	41.961
<b>Jumlah</b>		<b>163.961</b>				

Sumber: Kec. T. R. Timur, Dalam Angka, Th. 2018

### C. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Kelurahan Toro

Kelurahan Toro merupakan salah satu kelurahan/desa di wilayah Kabupaten/Kota Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada 4032' 4,0056" dan Lintang Selatan/Utara dan 120023' 1,9896" Bujur Barat/Timur dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Panyula
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kelurahan Cellu
- Sebelah Barat : Kelurahan Ta

Luas wilayah administratif Kelurahan Toro sekitar 4,1 km<sup>2</sup> atau 410 hektar, yang terbagi dalam 5Lingkungan dan 11 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan Toro sebanyak 4.305 jiwa dan 1.411 KK termasuk 471 KK miskin. Rincian jumlah penduduk untuk masing-masing Lingkungan,RW dan RT dapat dilihat pada tabel sebaran jumlah penduduk kelurahan.

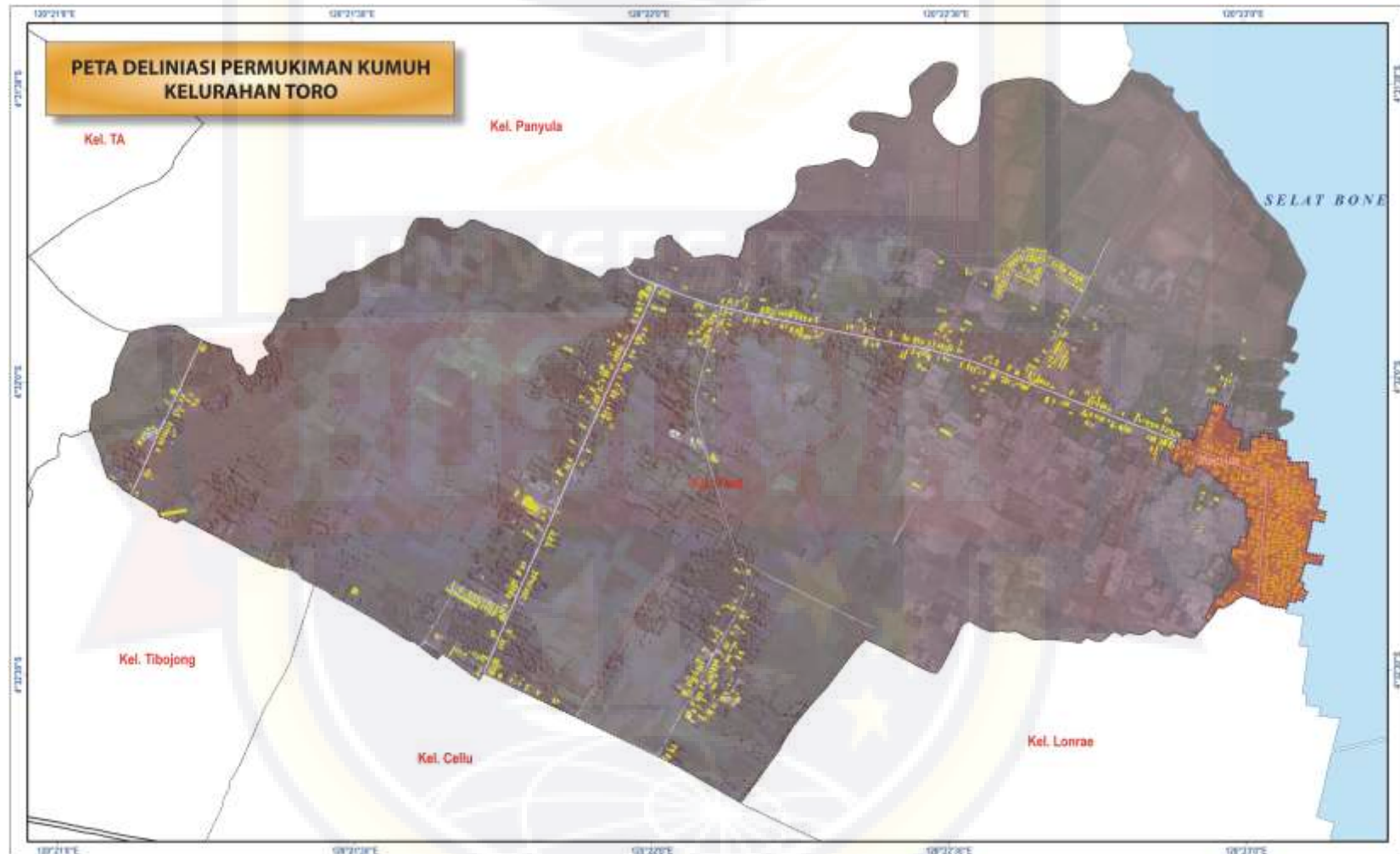


### 1. Wilayah Administrasi Kelurahan

Wilayah Administrasi Kel.Toro Terdapat Di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone . Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luas wilayah administratif sekitar 4,1 km<sup>2</sup> atau 410 hektar. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Toro Terdapat Di 4032' 4,0056" Lintang Selatan/Utara Dan 120023' 1,9896" Bujur Barat/Timur Batas Administrasi Kel. Toro, Sebelah Utara Kel. Panyula, Sebelah Timur Teluk Bone Sebelah Selatan Kel. Cellu Sebelah Barat Kel. TA

Jumlah Penduduk Kelurahan Toro Sebanyak 4.305 Jiwa yang terbagi di lima lingkungan ,LIMA (5) RW dan sebelas (11) RT.Karakteristik Wilayah Kel. Toro Sebagian Besar Merupakan Kawasan permukiman, Dengan Kondisi Topografi Datar, berbukit berkontur dan berada pada Ketinggian permukaan laut adalah 0- 10M DPL.

Peta.4.2. Delinasi Pemukiman Kumuh Kelurahan Toro



**Tabel 4.5. Data Sebaran Jumlah Penduduk Kelurahan**

No.	Lingkungan	Luas Wilayah (Ha)	RW	RT	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah KK	
					Laki	Wanita	Total	Total KK	KK Miskin
1.	Toro	99	RW.I	01	129	105	234	79	19
				02	140	107	247	83	20
2	Lona	98	RW.II	01	156	115	271	70	35
				02	157	116	273	85	45
3	Balakang	79	RW.III	01	116	89	205	67	22
				02	110	100	210	70	20
				03	124	79	203	64	20
4	Tippulue	77	RW.IV	01	600	635	1.235	421	125
				02	508	629	1.137	380	120
5	Cilellang	57	RW.V	01	60	80	140	42	23
				02	68	82	150	50	22
<b>Jumlah</b>		<b>410</b>			<b>2.168</b>	<b>2.137</b>	<b>4.305</b>	<b>1.411</b>	<b>471</b>

Sumber : Data Profil Kelurahan Toro thn 2018

#### a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kelurahan Toro didominasi untuk perumahan/permukiman penduduk, yaitu seluas 2,5 hektar atau sekitar 60,98% dari total luas lahan yang ada, yaitu sekitar 4,1km<sup>2</sup> atau 410 hektar. Selain lahan untuk permukiman, penggunaan lahan untuk fungsi lainnya juga terdapat di kelurahan ini antara lain untuk perkantoran, sawah, tambak, dan taman ruang terbuka (lapangan) serta fungsi-fungsi lainnya.

Penggunaan lahan di Kelurahan Toro diperuntukkan untuk perumahan/pemukiman, perkantoran/sekolah, persawahan, taman dan ruang terbuka/lapangan tambak, mesjid, industri, perkebunan, Pemakaman yaitu sekitar 4,10 hektar tabel

**Tabel 4.6. Penggunaan Lahan**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Perumahan/Permukiman	20	4,87
2.	Perkantoran	1	0,24
3.	Kebun	106	25,85
4.	Industri / Gudang	2	0,50
5.	Taman dan Ruang Terbuka/Lapangan	2	0,50
6.	Sawah	125	30,48
7.	<i>Tambak</i>	150	36,58
8.	<i>Tempat Ibadah (MASJID )</i>	1	0,24
9.	<i>Sekolah</i>	2	0,50
10.	<i>Perkuburan</i>	1	0,24
	<b>Jumlah</b>	<b>410</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2018

#### **b. Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah**

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Toro berasal dari etnis/suku Bugis yang beragama Islam Mata pencaharian utama penduduk di Kelurahan Toro sebagian besar adalah petani dan nelayan dan sebagian kecil diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai buruh.

Sarana sosial ekonomi yang memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, perumahan dan permukiman yang terdapat di Kelurahan Toro antara lain berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan satu buah, sarana ibadah, dan ruang terbuka atau taman berupa 3 buah Di Kelurahan Toro terdapat sarana ibadah berupa 7 buah mesjid, sarana pendidikan berupa gedung sekolah 6buah, sarana layanan kesehatan berupa

posyandu 2 unit Sedangkan gedung balai pertemuan warga tidak ada.

## **2. Kondisi Prasarana-Sarana Dasar Lingkungan**

### **a. Prasarana Jalan**

Sistem jaringan jalan pada kawasan/lingkungan perumahan dan permukiman terdiri dari : (a) jalan lokal sekunder I (LS-I) yang merupakan jalan poros perumahan/permukiman yang menghubungkan antara jalan kolektor dan atau pusat aktivitas di perumahan/permukiman; (b) jalan lokal sekunder II (LS-II) yang menghubungkan akses menuju jalan lokal sekunder III dan menghubungkan aktivitas atau menuju jalan yang lebih tinggi hirarkinya; dan (c) jalan lokal sekunder III (LS-III) yang memiliki fungsi utama untuk menghubungkan lalu-lintas dari dan menuju persil jalan lainnya dalam perumahan. Disamping sistem jaringan jalan lingkungan tersebut, pada kawasan/lingkungan permukiman juga terdapat jaringan jalan setapak yang berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai jalan pintas.

### **b. kondisi prasarana jalan**

Kondisi Jalan di Kelurahan Toro sekarang ini sudah banyak yang rusak, misalnya jalan yang berada di depan kantor lurah toro sampai ke perbatasan kelurahan cellu kondisinya rusak parah. Dan juga jalan - jalan lingkungannya masih banyak yang rusak.

**Tabel 4.7. Kondisi Jalan**

No.	Hirarki Jalan	Lebar Perkerasan (m)	Panjang Jalan (m)	Konstruksi	Kondisi Jalan
1.	Jln Lingkungan (LS-I)	3 m -5 m	7 km	Perkerasan	Pada umumnya rusak
2.	Jln Lingkungan (LS-II)	2,5 m – 3 m	8 km	Aspal, perkerasan	Sebagian rusak
3.	Jln Lingkungan (LS-III)	2,5 – 3 m	11 km	Aspal	Sebagian rusak
4.	Jalan Setapak	1,2 m – 2 m	13 km	Perkerasan, pavin, dan rabat	Sebagian rusak
	<b>Jumlah</b>	<b>13 m</b>	<b>37 km</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2018

### c. Drainase Lingkungan

Sistem drainase pada kawasan/lingkungan permukiman terdiri dari : saluran drainase tersier, saluran drainase sekunder dan primer. Jaringan drainase berikut jenis konstruksi dan kondisi saluran yang terdapat di wilayah Kelurahan Toro.

Kondisi drainase di kelurahan Toro umumnya rusak dan tidak berfungsi sehingga ketika hujan dan air pasang naik, terjadi genangan dan banjir. Lokasi Yang ada di Kelurahan Toro mengalami genangan dan banjirnya seperti Lingkungan Tippulue, Lingkungan Balakang, Lingkungan Lona, Lingkungan Toro, dan Lingkungan Cilellang.

**Gambar 4.1. Kondisi Drainase**



Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2018

Disamping data tentang ketersediaan dan kondisi saluran drainase lingkungan tersebut di atas, pada wilayah Kelurahan Toro juga terdapat sejumlah titik genangan yang utamanya disebabkan oleh kapasitas dan kualitas saluran drainase lingkungan yang kurang memadai.

#### **d. Prasarana Air Bersih**

Gambaran tentang sistem penyediaan air bersih pada kawasan/lingkungan permukiman di Kelurahan Toro meliputi : ketersediaan sumber air bersih dan layanan sistem penyediaan air bersih rumah tangga yang ada, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan.

Jumlah rumah tangga yang telah dilayani melalui sistem penyediaan air bersih perpipaan PDAM sebanyak 0 SR

(sambungan rumah) dan melalui bak penampung (kranumum/KU) sebanyak 0 KK/RT dengan jumlah KU sebanyak 0 unit.

Pelayanan air bersih di Kelurahan Toro didistribusikan oleh Sumur Bor, dan sebagian besar Lingkungan di Kelurahan Toro memanfaatkannya dan ada yang menggunakan sumur dangkal dan sumur dalam.

**Tabel 4.8 Pelayanan Air Minum**

RW	RT	Sumber Air Bersih Dan Jumlah KK Pemampaat							Lainnya Sebutkan
		PDAM	Sumur Dalam/Bor	Sumur Dangkal	Hidran Umum	Sungai	Mata Air	Danau	
I	01	-	40	39	-	-	-	-	
	02	-	42	41	-	-	-	-	
II	01	-	27	43	-	-	-	-	
	02	-	38	47	-	-	-	-	
III	01	-	32	35	-	-	-	-	
	02	-	29	41	-	-	-	-	
	03	-	33	31	-	-	-	-	
IV	01	-	321	100	-	-	-	-	
	02	-	255	125	-	-	-	-	
V	01	-	11	31	-	-	-	-	
	02	-	19	31	-	-	-	-	
Jumlah		-	847	564	-	-	-	-	

Sumber : Data Profil Kelurahan Toro thn 2018



Tabel 4.9 Potensi sumber Air Bersih

SUMBER AIR	LOKASI		Jarak Kepermukiman (m)	Kualitas Air	Kecukupan Air
	RW	RT			
Sungai	-	-	-	-	-
Mata Air	I	01	250 m	Bersih	Cukup
		02	210 M	Bersih	Cukup
	II	01	200 m	Bersih	Tidak Cukup
		02	260 M	Bersih	Cukup
	III	01	100 m	Bersih	Cukup
		02	150 m	Bersih	Cukup
		03	100 m	Bersih	Tidak Cukup
	IV	01	1.560 m	Bersih	Tidak Cukup
		02	1.700 m	Bersih	Tidak Cukup
	V	01	800 m	Bersih	Tidak Cukup
02		950 m	Bersih	Tidak Cukup	
Danau	-	-	-	-	-
Air Tanah Dalam	III	01	10 m	Bersih	Cukup
		02	30 m	Bersih	Cukup
	IV	01	25 m	Bersih	Tidak Cukup
		02	50 m	Bersih	Cukup
PDAM	-	-	-	-	-

Sumber : Data Profil Kelurahan Toro thn 2018

#### e. Prasarana Air Limbah (Sanitasi)

Gambaran tentang sistem pengolahan air limbah rumah tangga yang terdapat pada kawasan/lingkungan permukiman di Kelurahan Toro meliputi : sarana pembuangan air limbah yang ada dan sistem pengolahan air limbah yang digunakan oleh penduduk/warga masyarakat.

Kondisi air limbah di Kelurahan Toro umumnya tidak dikelola dengan baik, rata-rata rumah tangga disana membuang langsung

air limbah rumah tangganya ke selokan, atau langsung membuangnya kesungai dan laut, Tanpa dikelola dengan baik.

**Tabel 4.10 Sarana Sanitasi Lingkungan**

No.	Lokasi Lingkungan	RW	RT	Jumlah Kepala Keluarga / Rumah Tangga				Catatan
				Memiliki WC sendiri	Menggunakan WC dan IPAL Komunal	Menggunakan MCK Komunal	Tidak memiliki dan tidak menggunakan MCK Komunal	
1	Toro	I	01	49	Tidak ada	Tidak ada	30 KK	-
			02	54	Tidak ada	Tidak ada	29KK	-
2	Lona	II	01	55	Tidak ada	Tidak ada	15 KK	-
			02	62	Tidak ada	Tidak ada	23 KK	-
3	Balakang	II	01	34	Tidak ada	Tidak ada	33 KK	-
			02	29	Tidak ada	Tidak ada	41 KK	-
			03	27	Tidak ada	Tidak ada	37 KK	-
4	Tippulue	IV	01	21	Tidak ada	Tidak ada	400KK	Kebanyakan warga membuang air besar di laut, di belakang rumah atau D selokan.
			02	18	Tidak ada	Tidak ada	362KK	Kebanyakan warga membuang air besar di laut, di belakang rumah atau di sungai
5	Cilellang	V	01	36	Tidak ada	Tidak ada	6 KK	-
			02	45	Tidak ada	Tidak ada	5 KK	-

Sumber : Data Profil Kelurahan Toro thn 2018

#### f. Pengelolaan Persampahan

Gambaran tentang sistem pengelolaan dan prasarana sampah rumah tangga yang terdapat pada kawasan/lingkungan permukiman di Kelurahan meliputi: sistem pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah yang digunakan oleh penduduk/warga masyarakat.

Pengelolaan persampahan di Kelurahan Toro, Tidak Pernah Terlayani Oleh Pengangkut Mobil Sampah dari dinas kebersihan setempat sehingga warga di kelurahan toro membuang sampah dilaut dan di sungai terdekat.

**Gambar.4.2 Serakan Sampah**



Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2018

Tabel 4.11. Sarana Persampahan

No.	Lokasi			Sarana Pengelolaan Sampah								
				Tingkat Rumah Tangga			Sarana Pengangkutan			TPS / Penimbunan		
	Lingkungan	RW	RT	Jml Unit	Type & Volume (m3)	Tingkat Layanan (KK)	Jml Unit	Kapasitas (m3)	Tingkat Layanan (Rumah Tangga)	Jml Unit	Kapasitas (m3)	Area Layanan (ha)
1	Toro		01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			02	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lona	RW.II	01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			02	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Balakang	RW.III	01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			02	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			03	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Tippulue	RW IV	01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			02	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Cilellang	RW .V	01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			02	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Catatan: *Type sarana Pengumpulan sampah,*

- ✓ *Tingkat Rumah Tangga* : Bak sampah Rumah Tangga, Bak sampah Komunal, Bak sampah komposting
- ✓ *Sarana Pengangkutan* : Gerobak (Kap 1,3 m3), Becak sampah (Kap 1 m3), Motor sampah (Kap 1,5 m3)
- ✓ *TPS / Penimbunan* : *Open Dumping*, Bak Sampah, Kontainer (Kap 4 & 8 m3), Transfer Depo

#### D. Data Umum Permukiman Kumuh

Lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Toro tersebar pada sejumlah lingkungan. Lokasi kumuh di Kelurahan Toro terdapat di 5 (Lima) RW yaitu, RW.I, Dengan RW.V, RW.III, Lona RW.II dan RW.IV. Luas kawasan kumuh di Kelurahan Toro yaitu 22,88 ha, Jumlah penduduk dikawasan kumuh tersebut yaitu 1.326 jiwa/ha dan kepadatan Bangunan pada kawasan kumuh tersebut sebanyak 593 unit/ha. Data tentang sebaran lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh tersebut seperti dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 4.12. sebaran Lokasi Kumuh**

No.	Kawasan Kumuh		Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Penduduk		Jumlah Warga Miskin		Bangunan Rumah*	
	RW	RT		KK	Jiwa	RTM	Jiwa	Jumlah	Kumuh
1.	I	01	0,72	15	66	5	19	9	6
		02	1,00	16	70	8	26	8	6
2.	II	01	1,43	18	79	12	51	10	7
		02	2,00	9	38	3	15	8	2
3.	III	01	1,00	19	77	13	59	16	8
		02	1,50	17	69	4	20	13	5
		03	2,07	28	132	15	68	23	13
4.	IV	01	3,94	348	1.655	111	524	292	119
		02	7,50	256	1.114	98	488	197	59
5.	V	01	1,00	11	49	4	25	8	4
		02	0,72	13	54	6	31	9	5
<b>Jumlah</b>			<b>22,88</b>	<b>750</b>	<b>3.403</b>	<b>279</b>	<b>1.326</b>	<b>593</b>	<b>234</b>

*(Bangunan rumah kumuh adalah bangunan rumah tidak layak huni ditinjau dari konstruksi utama bangunan (atap, lantai dan dinding bangunan))*

**Gambar.4.3 Permukiman Kumuh Kel. Toro**



Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2018

#### **E. Kondisi Bangunan Rumah Tinggal**

Bangunan rumah tinggal yang ada di kawasan/lingkungan permukiman kumuh sebagian besar merupakan bangunan rumah non permanen dengan konstruksi lantai terbuat dari bahan kayu dinding dari bahan kayu dengan konstruksi atap terbuat dari seng. Jumlah bangunan rumah yang termasuk kategori kumuh sebanyak 234 unit (39,46%). Kondisi bangunan rumah tinggal di Kelurahan Toro lebih banyak yang layak huni dari pada yang kurang layak, rumah tinggal dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, sebahagian besar berstatus milik, luas lantai bangunan bervariasi dan jumlah penghuni tiap rumah tangga rata-rata diami 5(lima) orang. Adapun status kepemilikan bangunan rumah

umumnya berstatus milik sendiri seperti dirinci pada tabel pada kondisi bangunan rumah tinggal.

**Tabel 4.13 Kondisi Bangunan Rumah Tinggal**

No.	Kawasan Kumuh		Jumlah Bangunan Rumah			Kondisi Bangunan		Status Kepemilikan	
	RW	RT	Permanen	Semi-Permanen	Non-Permanen	Tidak Kumuh	Kumuh	Milik Sendiri	Lainnya
1.	I	01	0	3	6	3	6	9	0
		02	0	3	5	2	6	8	0
2.	II	01	2	2	6	3	7	10	0
		02	1	3	4	6	2	8	0
3.	III	01	2	5	9	8	8	16	0
		02	3	4	6	8	5	13	0
		03	5	7	11	10	13	23	0
4.	IV	01	39	73	180	173	119	292	0
		02	25	48	124	138	59	197	0
5.	V	01	1	2	5	4	4	8	0
		02	2	3	4	4	5	9	0
<b>Jumlah</b>			<b>80</b>	<b>153</b>	<b>360</b>	<b>359</b>	<b>234</b>	<b>593</b>	<b>0</b>

Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2018

## F. Analisis Efektivitas Penanganan Kumuh

Analisis efektivitas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur menggunakan metode Tabulasi Silang (*Crosstab*).

Analisis ini dilakukan untuk mengukur efektivitas penanganan kumuh dengan menggunakan empat variabel bebas yaitu pengawasan ( $X_1$ ), pengendalian ( $X_2$ ), pemberdayaan masyarakat ( $X_3$ ), dan revitalisasi ( $X_4$ ) menggunakan alat bantu aplikasi SPSS 22.

Output dari hasil analisis tabulasi silang menggunakan SPSS 22 tersaji dalam beberapa tabel yang harus di interpretasi untuk menemukan jawabannya. Adapun output yang dimaksud seperti berikut ini :

**Tabel 4.14 Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Efektivitas (Y) * Pengawasan (X1)	88	100.0%	0	.0%	88	100.0%
Efektivitas (Y) * Pengendalian (X2)	88	100.0%	0	.0%	88	100.0%
Efektivitas (Y) * Pemberdayaan Masyarakat (X3)	88	100.0%	0	.0%	88	100.0%
Efektivitas (Y) * Revitalisasi (X4)	88	100.0%	0	.0%	88	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Case Processing Summary*, menunjukkan dalam penelitian tersebut terdapat 88 sampel untuk mengukur variabel efektivitas (Y) terhadap pengawasan ( $X_1$ ), pengendalian ( $X_2$ ), pemberdayaan masyarakat ( $X_3$ ), dan revitalisasi ( $X_4$ ). Artinya Tidak ada yang hilang atau missing sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%.



## 1. Efektivitas (Y) terhadap Pengawasan (X1)

Tabel 4.15 Crosstab Efektivitas terhadap Pengawasan

			Pengawasan (X1)		Total
			Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	7	6	13
		Expected Count	6.8	6.2	13.0
		% within Efektivitas (Y)	53.8%	46.2%	100.0%
		% within Pengawasan (X1)	15.2%	14.3%	14.8%
		% of Total	8.0%	6.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	39	36	75
		Expected Count	39.2	35.8	75.0
		% within Efektivitas (Y)	52.0%	48.0%	100.0%
		% within Pengawasan (X1)	84.8%	85.7%	85.2%
		% of Total	44.3%	40.9%	85.2%
Total	Count	46	42	88	
	Expected Count	46.0	42.0	88.0	
	% within Efektivitas (Y)	52.3%	47.7%	100.0%	
	% within Pengawasan (X1)	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	52.3%	47.7%	100.0%	

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pengawasan Crosstabulation* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pengawasan skala sedang dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 44,3 %.

Hasil analisis efektivitas berdasarkan indikator pengawasan yang terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pelaporan diuraikan sebagai berikut :

## a. Efektivitas (Y) terhadap Monitoring

Tabel 4.16 Crosstab Efektivitas terhadap Monitoring

			Monitoring		Total
			Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	6	7	13
		Expected Count	4.3	8.7	13.0
		% within Efektivitas (Y)	46.2%	53.8%	100.0%
		% within Monitoring	20.7%	11.9%	14.8%
		% of Total	6.8%	8.0%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	23	52	75
		Expected Count	24.7	50.3	75.0
		% within Efektivitas (Y)	30.7%	69.3%	100.0%
		% within Monitoring	79.3%	88.1%	85.2%
		% of Total	26.1%	59.1%	85.2%
Total		Count	29	59	88
		Expected Count	29.0	59.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	33.0%	67.0%	100.0%
		% within Monitoring	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	33.0%	67.0%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Monitoring Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah monitoring skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 59,1 %. Artinya bahwa monitoring merupakan indikator yang sangat efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## b. Efektivitas (Y) terhadap Evaluasi

Tabel 4.17 Crosstab Efektivitas terhadap Evaluasi

			Evaluasi		Total
			Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	3	10	13
		Expected Count	4.3	8.7	13.0
		% within Efektivitas (Y)	23.1%	76.9%	100.0%
		% within Evaluasi	10.3%	16.9%	14.8%
		% of Total	3.4%	11.4%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	26	49	75
		Expected Count	24.7	50.3	75.0
		% within Efektivitas (Y)	34.7%	65.3%	100.0%
		% within Evaluasi	89.7%	83.1%	85.2%
		% of Total	29.5%	55.7%	85.2%
Total		Count	29	59	88
		Expected Count	29.0	59.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	33.0%	67.0%	100.0%
		% within Evaluasi	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	33.0%	67.0%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Evaluasi Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah monitoring skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 55,7 %. Artinya bahwa evaluasi merupakan indikator yang sangat efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## c. Efektivitas (Y) terhadap Pelaporan

Tabel 4.18 Crosstab Efektivitas terhadap Pelaporan

			Pelaporan		Total
			Rendah	Sedang	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	10	3	13
		Expected Count	11.8	1.2	13.0
		% within Efektivitas (Y)	76.9%	23.1%	100.0%
		% within Pelaporan	12.5%	37.5%	14.8%
		% of Total	11.4%	3.4%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	70	5	75
		Expected Count	68.2	6.8	75.0
		% within Efektivitas (Y)	93.3%	6.7%	100.0%
		% within Pelaporan	87.5%	62.5%	85.2%
		% of Total	79.5%	5.7%	85.2%
Total		Count	80	8	88
		Expected Count	80.0	8.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	90.9%	9.1%	100.0%
		% within Pelaporan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	90.9%	9.1%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pelaporan Crosstab* menunjukkan data objektif/frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pelaporan skala rendah dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 79,5 %. Artinya bahwa pelaporan merupakan indikator yang kurang efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## 2. Efektivitas (Y) terhadap Pengendalian (X2)

Tabel 4.19. Crosstab Efektivitas terhadap Pengendalian

			Pengendalian (X2)			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	1	10	2	13
		Expected Count	.3	12.0	.7	13.0
		% within Efektivitas (Y)	7.7%	76.9%	15.4%	100.0%
		% within Pengendalian (X2)	50.0%	12.3%	40.0%	14.8%
		% of Total	1.1%	11.4%	2.3%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	1	71	3	75
		Expected Count	1.7	69.0	4.3	75.0
		% within Efektivitas (Y)	1.3%	94.7%	4.0%	100.0%
		% within Pengendalian (X2)	50.0%	87.7%	60.0%	85.2%
		% of Total	1.1%	80.7%	3.4%	85.2%
Total		Count	2	81	5	88
		Expected Count	2.0	81.0	5.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	2.3%	92.0%	5.7%	100.0%
		% within Pengendalian (X2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	2.3%	92.0%	5.7%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pengendalian Crosstabulation* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pengendalian skala sedang dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 80,7 %.

Hasil analisis efektivitas berdasarkan indikator peraturan zonasi, perizinan, dan sanksi diuraikan sebagai berikut :

## a. Efektivitas (Y) terhadap Peraturan Zonasi

Tabel 4.20 Crosstab Efektivitas terhadap Peraturan Zonasi

			Peraturan Zonasi			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	1	1	11	13
		Expected Count	.3	1.5	11.2	13.0
		% within Efektivitas (Y)	7.7%	7.7%	84.6%	100.0%
		% within Peraturan Zonasi	50.0%	10.0%	14.5%	14.8%
		% of Total	1.1%	1.1%	12.5%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	1	9	65	75
		Expected Count	1.7	8.5	64.8	75.0
		% within Efektivitas (Y)	1.3%	12.0%	86.7%	100.0%
		% within Peraturan Zonasi	50.0%	90.0%	85.5%	85.2%
		% of Total	1.1%	10.2%	73.9%	85.2%
Total		Count	2	10	76	88
		Expected Count	2.0	10.0	76.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	2.3%	11.4%	86.4%	100.0%
		% within Peraturan Zonasi	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	2.3%	11.4%	86.4%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Peraturan Zonasi Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah peraturan zonasi skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 73,9 %. Artinya bahwa peraturan zonasi merupakan indikator yang sangat efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## b. Efektivitas (Y) terhadap Perizinan

Tabel 4.21. Crosstab Efektivitas terhadap Perizinan

			Perizinan		Total
			Rendah	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	11	2	13
		Expected Count	12.3	.7	13.0
		% within Efektivitas (Y)	84.6%	15.4%	100.0%
		% within Perizinan	13.3%	40.0%	14.8%
		% of Total	12.5%	2.3%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	72	3	75
		Expected Count	70.7	4.3	75.0
		% within Efektivitas (Y)	96.0%	4.0%	100.0%
		% within Perizinan	86.7%	60.0%	85.2%
		% of Total	81.8%	3.4%	85.2%
Total		Count	83	5	88
		Expected Count	83.0	5.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	94.3%	5.7%	100.0%
		% within Perizinan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	94.3%	5.7%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Perizinan Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah perizinan skala rendah dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 81,8 %. Artinya bahwa perizinan merupakan indikator yang kurang efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## c. Efektivitas (Y) terhadap Insentif

Tabel 4.22. Crosstab Efektivitas terhadap Insentif

			Insentif	
			Rendah	Total
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	13	13
		Expected Count	13.0	13.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Insentif	14.8%	14.8%
		% of Total	14.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	75	75
		Expected Count	75.0	75.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Insentif	85.2%	85.2%
		% of Total	85.2%	85.2%
Total		Count	88	88
		Expected Count	88.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Insentif	100.0%	100.0%
		% of Total	100.0%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Insentif Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah insentif skala rendah dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 85,2 %. Artinya bahwa insentif merupakan indikator yang kurang efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.



## d. Efektivitas (Y) terhadap Disinsentif

Tabel 4.23. Crosstab Efektivitas terhadap Disinsentif

			Disinsentif	
			Rendah	Total
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	13	13
		Expected Count	13.0	13.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Disinsentif	14.8%	14.8%
		% of Total	14.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	75	75
		Expected Count	75.0	75.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Disinsentif	85.2%	85.2%
		% of Total	85.2%	85.2%
Total		Count	88	88
		Expected Count	88.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Disinsentif	100.0%	100.0%
		% of Total	100.0%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Disinsentif Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah Disinsentif skala rendah dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 85,2 %. Artinya bahwa Disinsentif merupakan indikator yang kurang efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## e. Efektivitas (Y) terhadap Sanksi

Tabel 4.24. Crosstab Efektivitas terhadap Sanksi

			Sanksi		Total
			Rendah	Sedang	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	11	2	13
		Expected Count	11.7	1.3	13.0
		% within Efektivitas (Y)	84.6%	15.4%	100.0%
		% within Sanksi	13.9%	22.2%	14.8%
		% of Total	12.5%	2.3%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	68	7	75
		Expected Count	67.3	7.7	75.0
		% within Efektivitas (Y)	90.7%	9.3%	100.0%
		% within Sanksi	86.1%	77.8%	85.2%
		% of Total	77.3%	8.0%	85.2%
Total		Count	79	9	88
		Expected Count	79.0	9.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	89.8%	10.2%	100.0%
		% within Sanksi	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	89.8%	10.2%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Sanksi Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah sanksi skala rendah dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 77,3 %. Artinya bahwa sanksi merupakan indikator yang kurang efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

### 3. Efektivitas (Y) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (X3)

Tabel 4.25. Crosstab Efektivitas terhadap Pemberdayaan Masyarakat

			Pemberdayaan Masyarakat (X3)		Total
			Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	0	13	13
		Expected Count	.4	12.6	13.0
		% within Efektivitas (Y)	.0%	100.0%	100.0%
		% within Pemberdayaan Masyarakat (X3)	.0%	15.3%	14.8%
		% of Total	.0%	14.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	3	72	75
		Expected Count	2.6	72.4	75.0
		% within Efektivitas (Y)	4.0%	96.0%	100.0%
		% within Pemberdayaan Masyarakat (X3)	100.0%	84.7%	85.2%
		% of Total	3.4%	81.8%	85.2%
Total	Count	3	85	88	
	Expected Count	3.0	85.0	88.0	
	% within Efektivitas (Y)	3.4%	96.6%	100.0%	
	% within Pemberdayaan Masyarakat (X3)	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	3.4%	96.6%	100.0%	

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pemberdayaan Masyarakat Crosstabulation* menunjukkan data objektif/frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pemberdayaan masyarakat skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 81,8 %.

Hasil analisis efektivitas berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan diuraikan sebagai berikut :

a. Efektivitas (Y) terhadap Perencanaan

**Tabel 4.26. Crosstab Efektivitas terhadap Perencanaan**

			Perencanaan			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	1	3	9	13
		Expected Count	1.5	3.0	8.6	13.0
		% within Efektivitas (Y)	7.7%	23.1%	69.2%	100.0%
		% within Perencanaan	10.0%	15.0%	15.5%	14.8%
		% of Total	1.1%	3.4%	10.2%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	9	17	49	75
		Expected Count	8.5	17.0	49.4	75.0
		% within Efektivitas (Y)	12.0%	22.7%	65.3%	100.0%
		% within Perencanaan	90.0%	85.0%	84.5%	85.2%
		% of Total	10.2%	19.3%	55.7%	85.2%
Total		Count	10	20	58	88
		Expected Count	10.0	20.0	58.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	11.4%	22.7%	65.9%	100.0%
		% within Perencanaan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	11.4%	22.7%	65.9%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Perencanaan Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah perencanaan skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada presentase 55,7 %. Artinya bahwa perencanaan merupakan indikator yang sangat

efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

b. Efektivitas (Y) terhadap Pelaksanaan

**Tabel 4.27. Crosstab Efektivitas terhadap Pelaksanaan**

			Pelaksanaan			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	0	0	13	13
		Expected Count	.4	1.3	11.2	13.0
		% within Efektivitas (Y)	.0%	.0%	100.0%	100.0%
		% within Pelaksanaan	.0%	.0%	17.1%	14.8%
		% of Total	.0%	.0%	14.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	3	9	63	75
		Expected Count	2.6	7.7	64.8	75.0
		% within Efektivitas (Y)	4.0%	12.0%	84.0%	100.0%
		% within Pelaksanaan	100.0%	100.0%	82.9%	85.2%
		% of Total	3.4%	10.2%	71.6%	85.2%
Total		Count	3	9	76	88
		Expected Count	3.0	9.0	76.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	3.4%	10.2%	86.4%	100.0%
		% within Pelaksanaan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	3.4%	10.2%	86.4%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pelaksanaan Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pelaksanaan skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 71,6 %. Artinya bahwa pelaksanaan merupakan indikator yang sangat

efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

c. Efektivitas (Y) terhadap Pemeliharaan

**Tabel 4.28. Crosstab Efektivitas terhadap Pemeliharaan**

			Pemeliharaan			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	1	1	11	13
		Expected Count	.6	1.5	10.9	13.0
		% within Efektivitas (Y)	7.7%	7.7%	84.6%	100.0%
		% within Pemeliharaan	25.0%	10.0%	14.9%	14.8%
		% of Total	1.1%	1.1%	12.5%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	3	9	63	75
		Expected Count	3.4	8.5	63.1	75.0
		% within Efektivitas (Y)	4.0%	12.0%	84.0%	100.0%
		% within Pemeliharaan	75.0%	90.0%	85.1%	85.2%
		% of Total	3.4%	10.2%	71.6%	85.2%
Total		Count	4	10	74	88
		Expected Count	4.0	10.0	74.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	4.5%	11.4%	84.1%	100.0%
		% within Pemeliharaan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	4.5%	11.4%	84.1%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pemeliharaan Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pemeliharaan skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 71,6 %. Artinya bahwa pemeliharaan merupakan

indikator yang sangat efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

#### 4. Efektivitas (Y) terhadap Revitalisasi (X4)

Tabel 4.29. Crosstab Efektivitas terhadap Revitalisasi

			Revitalisasi (X4)	
			Tinggi	Total
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	13	13
		Expected Count	13.0	13.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Revitalisasi (X4)	14.8%	14.8%
		% of Total	14.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	75	75
		Expected Count	75.0	75.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Revitalisasi (X4)	85.2%	85.2%
		% of Total	85.2%	85.2%
Total		Count	88	88
		Expected Count	88.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Revitalisasi (X4)	100.0%	100.0%
		% of Total	100.0%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Revitalisasi Cross tabulation* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (Count) dan frekuensi harapan (Expected Count) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah revitalisasi skala sedang dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 85,2 %.

Hasil analisis efektivitas berdasarkan indikator pemugaran, peremajaan, dan pemukiman baru diuraikan sebagai berikut :

a. Efektivitas (Y) terhadap Pemugaran

**Tabel 4.30. Crosstab Efektivitas terhadap Pemugaran**

			Pemugaran	
			Tinggi	Total
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	13	13
		Expected Count	13.0	13.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Pemugaran	14.8%	14.8%
		% of Total	14.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	75	75
		Expected Count	75.0	75.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Pemugaran	85.2%	85.2%
		% of Total	85.2%	85.2%
Total	Count	88	88	
	Expected Count	88.0	88.0	
	% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%	
	% within Pemugaran	100.0%	100.0%	
	% of Total	100.0%	100.0%	

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pemugaran Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pemugaran skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 85,2 %. Artinya bahwa pemugaran merupakan indikator yang sangat



efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

b. Efektivitas (Y) terhadap Peremajaan

**Tabel 4.31. Crosstab Efektivitas terhadap Peremajaan**

			Peremajaan	
			Tinggi	Total
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	13	13
		Expected Count	13.0	13.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Peremajaan	14.8%	14.8%
		% of Total	14.8%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	75	75
		Expected Count	75.0	75.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Peremajaan	85.2%	85.2%
		% of Total	85.2%	85.2%
Total		Count	88	88
		Expected Count	88.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	100.0%	100.0%
		% within Peremajaan	100.0%	100.0%
		% of Total	100.0%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Peremajaan Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah peremajaan skala tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada persentase 85,2 %. Artinya bahwa peremajaan merupakan indikator yang sangat

efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

c. Efektivitas (Y) terhadap Pemukiman Baru

**Tabel 4.32. Crosstab Efektivitas terhadap Pemukiman Baru**

			Pemukiman Baru			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Efektivitas (Y)	Kurang Efektif	Count	12	0	1	13
		Expected Count	12.3	.4	.3	13.0
		% within Efektivitas (Y)	92.3%	.0%	7.7%	100.0%
		% within Pemukiman Baru	14.5%	.0%	50.0%	14.8%
		% of Total	13.6%	.0%	1.1%	14.8%
	Sangat Efektif	Count	71	3	1	75
		Expected Count	70.7	2.6	1.7	75.0
		% within Efektivitas (Y)	94.7%	4.0%	1.3%	100.0%
		% within Pemukiman Baru	85.5%	100.0%	50.0%	85.2%
		% of Total	80.7%	3.4%	1.1%	85.2%
Total		Count	83	3	2	88
		Expected Count	83.0	3.0	2.0	88.0
		% within Efektivitas (Y)	94.3%	3.4%	2.3%	100.0%
		% within Pemukiman Baru	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	94.3%	3.4%	2.3%	100.0%

Sumber : Hasil analisis SPSS 22, Tahun 2018

Pada tabel *Efektivitas terhadap Pemukiman Baru Crosstab* menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata (*Count*) dan frekuensi harapan (*Expected Count*) baik dalam bentuk skor maupun presentase.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase tertinggi adalah pemukiman baru skala rendah dengan tingkat efektivitas sangat efektif yaitu pada presentase 80,7 %. Artinya bahwa pemukiman baru merupakan indikator

yang kurang efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## **G. Pembahasan Hasil Analisis Efektivitas Penanganan Kawasan**

### **Permukiman Kumuh**

Setelah melakukan analisis Tabulasi Silang (Crosstab) dengan menggunakan SPSS 22. Peneliti memperoleh hasil bahwa, efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh menggunakan 4 variabel X yaitu Pengawasan ( $X_1$ ), Pengendalian ( $X_2$ ), Pemberdayaan Masyarakat ( $X_3$ ), dan Revitalisasi ( $X_4$ ) adalah variabel  $X_3$  yaitu pemberdayaan masyarakat dengan 3 indikator yang mana hasil presentasi menunjukkan indikator perencanaan 55,7%, pelaksanaan 71,6%, dan pemeliharaan 71,6% dengan tingkat efektivitas sangat efektif. (Mubarak, 2010) menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. dengan mengadopsi teori Efektivitas H. Emerson (Sedarmayanti, 2006:61) yang menyatakan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri

Kawasan kumuh di Kelurahan Toro yang mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

kegiatan manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah, memegang peranan yang sangat penting terutama dalam usaha penanganan kawasan pemukiman kumuh, permukiman kumuh memiliki ciri kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. Penggunaan ruang tersebut berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul pada daerah sempadan untuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya yang kurang mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik

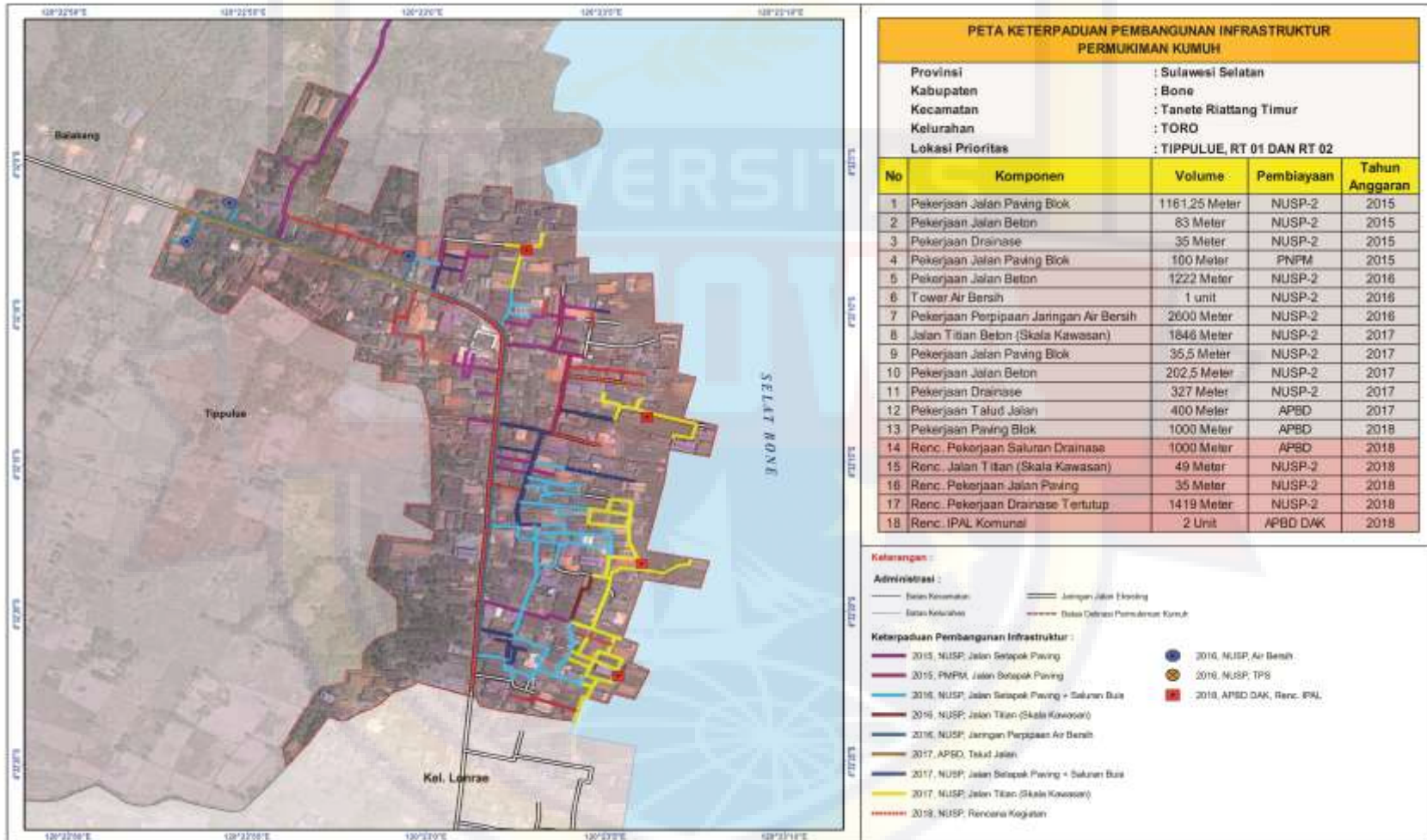
dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni.

Mengacu kepada undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.



**BOSOWA**

### 4.3. Peta Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kelurahan Toro



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari hasil analisis tersebut adalah bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki kitingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur. Sementara pengawasan, pengendalian, dan revitalisasi memiliki tingkat efektivitas sedang dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Jika diuraikan berdasarkan indikatornya, maka :

- Pemberdayaan masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sangat efektif dalam upaya penanganan permukiman kumuh di kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- Pengawasan terhadap pembangunan dalam bentuk monitoring dan evaluasi sangat efektif dalam upaya penanganan permukiman kumuh, sedangkan pelaporan kurang efektif dalam upaya penanganan permukiman kumuh di kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- Pengendalian terhadap pembangunan dalam bentuk peraturan zonasi sangat efektif dalam upaya penanganan permukiman

kumuh, sedangkan perizinan Insentif, Disinsentif, dan sanksi kurang efektif dalam upaya penanganan permukiman kumuh di kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

- Revitalisasi kawasan kumuh dalam bentuk pemugaran dan peremajaan sangat efektif dalam upaya penanganan permukiman kumuh, sedangkan pemukiman baru kurang efektif dalam upaya penanganan permukiman kumuh di kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.

#### **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat kawasan permukiman kumuh Kelurahan Toro dinilai sangat efektif sehingga perlu adanya tindak lanjut pemerintah untuk merumuskan metode atau model pemberdayaan masyarakat yang paling ideal untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur.
2. Pengendalian, pengawasan, dan revitalisasi juga dinilai cukup efektif dalam penanganan kumuh di Kelurahan Toro, oleh sebab itu maka untuk menyelesaikan persoalan kumuh di Kelurahan Toro perlu adanya penanganan yang bersifat komprehensif yang merupakan perumusan dari pola pengendalian, pengawasan,



pemberdayaan masyarakat, dan revitalisasi dalam satu kesatuan model penanganan.

3. Perlu adanya kajian lanjutan bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang efektivitas penanganan kumuh, yaitu kajian terkait model penanganan kumuh yang paling efektif yang terdiri dari empat komponen yaitu pengendalian, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan revitalisasi.



## DAFTAR PUSTAKA

*Agung, Kurniawan.(2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta :*

*Pembaharuan*

*Azhar Susanto. (2005). Sistem Informasi Manajemen.Jakarta : Ghaila Indonesia.*

*Choguill, C.L. (1994). Sustainable Human Settlements in an Urbanising World. Inggris : University of Sheffield.*

*Danim, Sudarwan. (2012). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta : Rineka*

*Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU, Perbaikan Lingkungan danPeremajaan Lingkungan, Resettlement, Tahun 1998*

*Effendy, Onong Uchjana. (2009). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya*

*Erwin, dan Firmansyah. (2016). Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Bandung (Kelurahan Nyengseret). Skripsi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan : Bandung*

*Hadri, Utomo Is. (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam ImplementasiProyek Peremajaan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai KalianyarMojosongo. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SebelasMaret*

*Handayaniingrat, Soewarno, (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Haji Masagung*

Herlianto. (1997). *Urbanisasi, Pembangunan, dan Kerusakan Kota.*

Bandung : BintangAlumni

Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan.* Yogyakarta :

Gajah Mada University Press

Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.*

Bandung : Refika Aditama

Mutaqin Z. (2017). *Studi Penentuan Prioritas Penanganan Lingkungan*

*Permukiman Kumuh Menuju Kampung Berkelanjutan(Studi Kasus Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang).* Tesis

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana

Universitas Lampung : Bandar Lampung

Nugroho W.(2017). *Penanganan Permukiman Kumuh dengan*

*Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di Pancuran Kota*

*Salatiga.* Tesis Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Diponegoro

: Semarang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Rahayu T. dkk. (2003). *Evaluasi Program Penataan Dan Rehabilitasi*

*Permukiman Kumuh Studi Kasus Kawasan Bantaran Sungai Code*

*Bagian Utara, Yogyakarta.* Jurnal Manusia dan Lingkungan,

Volume 10 Nomor 2, Juli 2003. Pusat Studi Lingkungan Hidup

(PSLH) Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta

Riduwan. (2007). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. CV Alfabeta :  
Bandung

Sedarmayanti. (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.  
Bandung : Mandar Maju

Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta  
: PT. Bumi Aksara,

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.  
Bandung : CV Alfabeta

Sukanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja  
Grafindo Persada

Suparlan P. (2001). *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam  
Masyarakat Majemuk Indonesia*. Jurnal Antropologi Indonesia 66,  
2001.

Tangkilisan, Nogi Hessel. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : PT.  
Gramedia Widiasarana Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang  
Perumahan dan Permukiman

Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*.  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar

## LAMPIRAN I

### Entri Data Analisis Tabulasi Silang

	Y	X1	X2	X3	X4
1	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
2	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
3	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
4	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
5	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
6	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00
7	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
8	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
9	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
10	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
11	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
12	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00
13	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00
14	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00
15	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
16	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
17	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
18	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
19	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
20	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
21	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
22	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00
23	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
24	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
25	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00

### Lanjutan Lampiran II

	Y	X1	X2	X3	X4
26	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
27	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
28	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
29	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
30	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
31	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
32	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
33	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00
34	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
35	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
36	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
37	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
38	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
39	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
40	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
41	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
42	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
43	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
44	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
45	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
46	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
47	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00
48	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
49	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
50	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00

### Lanjutan Lampiran II

	Y	X1	X2	X3	X4
51	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
52	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
53	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
54	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
55	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
56	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
57	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
58	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
59	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
60	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
61	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
62	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
63	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
64	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
65	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
66	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
67	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
68	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
69	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
70	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
71	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00
72	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
73	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
74	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
75	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00

### Lanjutan Lampiran II

	Y	X1	X2	X3	X4
76	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
77	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
78	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00
79	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
80	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
81	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
82	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
83	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
84	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
85	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
86	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
87	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
88	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00

**BOSUWA**





## Lampiran II

### Kuesioner Penelitian

Judul Penelitian :

**Evektifitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan  
Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone  
(Studi Kasus : Permukiman Kumuh Blok C kelurahan Toro)**

Oleh : Syamsul Bahri / MPW4514013

*Dengan hormat,*

*Penelitian ini semata-mata untuk tujuan ilmiah, jawaban anda akan digunakan untuk kepentingan akademik dan di jaga kerahasiaanya, mohon Bapak/ibu/saudara mengisi kuisisioner dengan benar. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/ibu/saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih.*

Dapat di isi dengan menjawab dan melingkari jawaban.

#### I. DATA RESPONDEN

1.	Nama responden	:				
2.	Umur	: Tahun				
3.	Jenis kelamin	a. Laki-laki	b. Perempuan			
4.	Agama	:				
5.	Pekerjaan	:				
6.	Asal daerah/suku	:				
7.	Pendidikan Tertinggi	a. Tidak sekolah	b. SD	c. SMP	d. SMA	e.....
8.	Alasan menetap di tempat sekarang	a. Turun temurun	b. Perkawinan	c. Warisan Orang tua	d. Pekerjaan	e.....
9.	Jika telah tinggal turun temurun maka yang tinggal saat ini generasi Ke-	:				
10.	Jenis keluarga	a. keluarga inti			b. Keluarga besar	
11.	Anggota keluarga yang tinggal di rumah	a. 2	b. 3	c. 4	d. 5	e.....
12.	Anggota keluarga yang bekerja berjumlah	a. 1	b. 2	c. 3	d. 4	e.....
13.	Lama tinggal	a. Kurang dari 5 tahun	b. 5-10 tahun	c. 10-20 tahun	d. 20-30 tahun	e.....
14.	Penghasilan rata-rata perbulan	a. Kurang dari Rp. 500.000	b. Rp. 500.000-1.000.000	c. Rp. 1.000.000-1.500.000	d. Rp. 1.500.000-2.000.000	e.....
15.	Status kepemilikan lahan	a. Milik sendiri	b. Warisan	c. Sewa	d. Negara	e.....

## II. PENANGANAN KUMUH

1.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan, menurut saudara apakah waktu penyelesaiannya sesuai dengan target yang diberikan?		
	a. Sangat sesuai	b. Kurang sesuai	c. Tidak sesuai
2.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan, menurut saudara apakah penggunaan anggarannya sesuai dengan jumlah yang dianggarkan?		
	a. Sangat sesuai	b. Kurang sesuai	c. Tidak sesuai
3.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan, menurut saudara apakah pembangunan tersebut tepat sasaran sesuai dengan yang diperuntukkan?		
	a. Sangat sesuai	b. Kurang sesuai	c. Tidak sesuai
4.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan, menurut yang saudara ketahui apakah proses pemantauan dan pengawasan sering dilakukan?		
	a. Sangat sering	b. Jarang	c. Tidak pernah
5.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan, menurut yang saudara ketahui apakah sering dilakukai evaluasi terhadap pekerjaan yang sedang berjalan?		
	a. Sangat sering	b. Jarang	c. Tidak pernah
6.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan, menurut yang saudara ketahui apakah sering dibuatkan pelaporan terhadap perkembangan/progres pekerjaan yang sedang berjalan?		
	a. Sangat sering	b. Jarang	c. Tidak pernah
7.	Menurut yang saudara ketahui, keberadaan tempat tinggal saudara sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur oleh pemerintah daerah setempat?		
	a. Sangat sesuai	b. Kurang sesuai	c. Tidak sesuai
8.	Menurut yang saudara ketahui, keberadaan tempat tinggal saudara telah mendapat izin/ sesuai izin dari pemerintah setempat?		
	a. Sangat sesuai	b. Kurang sesuai	c. Tidak sesuai
9.	Apakah keberadaan tempat tinggal saudara pernah/sering mendapat sanksi karena tidak mendapat izin membangun sebab tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur oleh pemerintah?		
	a. Sangat sering	b. Jarang	c. Tidak pernah
10.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan di tempat tinggal saudara, apakah saudara pernah/sering dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan tersebut?		
	a. Sangat sering	b. Jarang	c. Tidak pernah
11.	Pada saat perbaikan prasarana lingkungan di tempat tinggal saudara, apakah saudara pernah/sering dilibatkan dalam proses pengerjaan/pelaksanaan kegiatan tersebut?		
	a. Sangat sering	b. Jarang	c. Tidak pernah
12.	Setelah perbaikan prasarana lingkungan di tempat tinggal saudara, apakah saudara dilibatkan dalam proses pemeliharaan bangunan tersebut?		
	a. Sangat terlibat	b. Jarang	c. Tidak pernah
13.	Apabila saudara mendapat kesempatan untuk diperbaiki tempat tinggal saudara yang rusak oleh pemerintah setempat apakah saudara setuju?		
	a. Sangat setuju	b. Kurang setuju	c. Tidak setuju

14.	Apabila saudara mendapat kesempatan untuk dibagun ulang tempat tinggal saudara yang tidak layak/rusak oleh pemerintah setempat apakah saudara setuju?		
	a. Sangat setuju	b. Kurang setuju	c. Tidak setuju
15.	Apabila saudara mendapat kesempatan untuk dibagunkan tempat tinggal saudara di tempat lain yang disediakan oleh pemerintah setempat apakah saudara setuju?		
	a. Sangat setuju	b. Kurang setuju	c. Tidak setuju



===TERIMA KASIH===